

No. Reg: 191190000023077

## LAPORAN PENELITIAN



### KONSEPTUALISASI INTEGRASI MATERI KEPENDUDUKAN DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PROGRAM SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

**Ketua Peneliti**

**Dr. Anton Widyanto, M.Ag**

NIDN: 2009107601

ID Peneliti: 200910760107036

**Anggota:**

Syarifah Dahliana, M.Ag, M.Ed, Ph.D

Kategori Penelitian	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY  
TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : KONSEPTUALISASI INTEGRASI MATERI KEPENDUDUKAN DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PROGRAM SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
- b. Kategori Penelitian : PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
- c. No. Registrasi : 191190000023077
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
2. Peneliti/Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Dr. Anton Widyanto, M.Ag
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP<sup>(Kosongkan bagi Non PNS)</sup> : 197610092002121002
  - d. NIDN : 2009107601
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 200910760107036
  - f. Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / (IV/b)
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - h. Fakultas/Prodi : Pascasarjana / S2 Pendidikan Agama Islam
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Syarifah Dahliana, M.Ag, M.Ed, Ph.D
    - Jenis Kelamin : Perempuan
    - Fakultas/Prodi : Pascasarjana / S2 Pendidikan Agama Islam
  - j. Anggota Peneliti 2<sup>(Jika Ada)</sup>
    - Nama Lengkap : Muhammad Syauqi
    - Jenis Kelamin : Laki-Laki
    - Fakultas/Prodi : Pascasarjana / Mahasiswa S2 Pendidikan Agama Islam
3. Lokasi Penelitian : Aceh dan Jawa Timur
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 150.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 Oktober 2018  
Peneliti,

**Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.**  
NIP. 197204261997031002

**Dr. Anton Widyanto, M.Ag**  
NIDN. 197610092002121002

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Anton Widyanto  
NIDN : 2009107601  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bojonegoro/ 09 Oktober 1976  
Alamat : Dsn Kp. Blang, Tungkop, Darussalam  
Aceh Besar  
Fakultas/Prodi : Pascasarjana/ PAI-S2

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“KONSEPTUALISASI INTEGRASI MATERI KEPENDUDUKAN DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PROGRAM SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN DI INDONESIA”** adalah benar-benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Oktober 2019  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,

**Anton Widyanto**  
NIDN. 2009107601

# KONSEPTUALISASI INTEGRASI MATERI KEPENDUDUKAN DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PROGRAM SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

**Ketua Peneliti:**

Anton Widyanto

**Anggota Peneliti:**

Syarifah Dahliana

## **Abstrak**

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan salah satu program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada generasi muda tentang signifikansi masalah kependudukan. Di antara desainnya adalah dengan cara mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran, serta pembentukan Pojok Kependudukan. Studi berikut menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 10 Fajar Harapan dan MAN Model Bojonegoro secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini antara lain terlihat dari sekolah pelaksana yang merespon positif program BKKBN ini. Meski demikian, masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Integrasi materi SSK ke dalam Pendidikan Agama Islam yang bisa dijalankan untuk memperkuat Sekolah Siaga Kependudukan di kedua sekolah masih belum terlihat di lapangan. Secara umum strategi integrasi materi kependudukan dalam mata pelajaran tertentu sebagaimana dirancang oleh BKKBN sudah tepat. Hal ini tentu dengan pertimbangan untuk tidak menambah beban belajar siswa. Lebih dari itu, dalam konteks Aceh, seiring dengan pelaksanaan kurikulum Aceh, maka nilai-nilai keislaman perlu sekali diakomodir. Akan tetapi sayangnya hal ini belum banyak disentuh oleh kedua sekolah yang menjadi *role model* pelaksanaan program SSK di Indonesia ini.

**Kata Kunci:** *Sekolah Siaga Kependudukan; Pendidikan Agama Islam; Kearifan Lokal; BKKBN*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam peneliti persembahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Hanya atas rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “Konseptualisasi Integrasi Materi Kependudukan Dalam Pendidikan Agama Islam Melalui Program Sekolah Siaga Kependudukan di Indonesia”.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut berkontribusi baik dalam hal kebijakan maupun penyediaan data yang tim peneliti perlukan. Oleh karena itu peneliti tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala MAN Model Bojonegoro, Jawa Timur;
5. Kepala SMA Negeri Fajar Harapan Banda Aceh;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya yang *concern* dengan isu-isu kependudukan dan kaitannya dengan implementasinya dalam dunia pendidikan. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 22 Oktober 2019

Ketua Peneliti,

**Anton Widyanto**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	11
B. Kerangka Konseptual .....	19
C. Definisi Operasional .....	29
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	31
B. Metode Pengumpulan Data.....	35
C. Metode Analisis Data .....	37
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	45
1. Proses Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan	47
2. Kendala yang Dihadapi Sekolah .....	52
3. Integrasi SSK ke dalam Pendidikan Agama Islam .....	61
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	65
B. Saran-saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>



**LAMPIRAN-LAMPIRAN  
BIODATA PENELITI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan salah satu program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada generasi muda tentang signifikansi masalah kependudukan. Program ini didesain dengan cara mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran (bukan berbentuk mata pelajaran tersendiri). Untuk mendukung program ini ikut pula dicanangkan program pojok kependudukan sebagai sumber belajar peserta didik di Lembaga Pendidikan formal.

Keberadaan Sekolah Siaga Kependudukan pada dasarnya sejalan dengan pendidikan kependudukan yang disuarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak tahun 1970-an.<sup>1 2</sup> Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa isu pendidikan dan kependudukan merupakan dua hal yang saling terkait dan dapat saling mempengaruhi. Pendidikan juga dianggap sebagai media yang efektif untuk mengatasi masalah-

---

<sup>1</sup>UNESCO, *Population Education: A Contemporary Concern* (Paris: Unesco, 1978), 12.

<sup>2</sup> CO, 1978

masalah kependudukan dalam berbagai aspeknya yang dihadapi berbagai negara di dunia.<sup>3</sup>

Dalam konteks nasional, Sekolah Siaga Kependudukan merupakan salah satu bagian inti rancangan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019. Pada Buku I dinyatakan bahwa yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan di antaranya adalah: “*Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja*”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Č Žiga and Štefan Bojnec, “Population, Education and Socio-Economic DEvelopment in Slovenia,” in *Managing the Process of Globalisation in New and Upcoming EU Members* (Bernardlin, Slovenia, 2005), 24–26, <http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6573-03-9/cepar.pdf>; Naushin Mahmood, “The Demographic Dividend: Effects of Population Change on School Education in Pakistan,” *PIDE-Working Papers*, 2011, <http://ideas.repec.org/p/pid/wpaper/201168.html>; C.T. Davies, “Population Education,” *Lifelong Education for Adults* 20 (1989): 131–33, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-030851-7.50044-8>; Defaru Debebe, “Population Education , Fertility and Family Planning in Ethiopia,” *International Journal of Pharmaceutical and Medical Research* 2, no. 4 (2014): 4–13; Wolfgang Lutz, “Population, Education and the Sustainable Development Goals,” 2016; World Health Organization, “Family Life, Reproductive Health, and Population Education: Key Elements of a Health-Promoting School,” *WHO Information Series on School Health*, no. Document Eight (2003); UNESCO, *Population Education: A Contemporary Concern*.

Menindaklanjuti hal di atas, beberapa provinsi di Indonesia kemudian melaksanakan program Sekolah Siaga Kependudukan di antaranya Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Aceh.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Laporan Kinerja BKKBN Tahun 2015*, accessed March 26, 2017, [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/LAKIP\\_BKKBN\\_2016\\_1.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/LAKIP_BKKBN_2016_1.pdf).

<sup>5</sup>“BKKBN Jalankan Sekolah Siaga Kependudukan,” 2018, <https://jateng.antaranews.com/detail/bkkbn-jalankan-sekolah-siaga-kependudukan.html>; “Berita: BKKBN KEMBANGKAN MODEL SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK) DI 108 SEKOLAH SE-JAWA BARAT,” accessed April 7, 2018, [http://jabar.bkkbn.go.id/\\_layouts/mobile/dispform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=1776](http://jabar.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=1776); “SMAN 1 Tapaktuan Jadi Sekolah Siaga Kependudukan,” accessed April 7, 2018, <http://aceh.tribunnews.com/2018/01/13/sman-1-tapaktuan-jadi-sekolah-siaga-kependudukan>; “MAN Model Bojonegoro Gelar Sastra Pelataran,” accessed April 15, 2018, <https://www.jawapos.com/radarbojonegoro/read/2018/02/16/49679/man-model-bojonegoro-gelar-sastra-pelataran>; “Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Diresmikan - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial Kabupaten Belitung,” accessed April 15, 2018, <https://dpppas.belitungkab.go.id/v1/sekolah-siaga-kependudukan-ssk-diresmikan/>; “SMAN 1 Tapaktuan Jadi Sekolah Siaga Kependudukan - Serambi Indonesia,” 2018, <http://aceh.tribunnews.com/2018/01/13/sman-1-tapaktuan-jadi-sekolah-siaga-kependudukan>; “Kabupaten Rejang Lebong Terapkan Sekolah Siaga Kependudukan,” accessed April 15, 2018, <http://infopublik.id/read/214953/kabupaten-rejang-lebong-sudah-terapkan-sekolah-siaga-kependudukan>; “Disdalduk KB Pekanbaru Launching Program Sekolah Siaga Kependudukan,” accessed April 15, 2018, <http://m.halloriau.com/read-100657-2018-03-06-disdalduk-kb-pekanbaru-launching-program-sekolah-siaga-kependudukan.html#sthash.E1kOd0d2.dpbs>; “TP PKK Banjarbaru Resmikan Pojok Kependudukan Di Sekolah,” accessed April 15, 2018, <http://kalsel.prokal.co/read/news/13029-tp-pkk-banjarbaru-resmikan-pojok-kependudukan-di-sekolah.html>; “SMAN-8 Samarinda Model Sekolah

Dalam konteks Aceh, program SSK juga sudah dicanangkan di beberapa sekolah di antaranya SMAN Fajar Harapan Banda Aceh. Keberadaan program ini pada dasarnya sangat penting mengingat sejauh ini di kalangan masyarakat Aceh sendiri masih terdapat beberapa pandangan negatif terhadap program Keluarga Berencana karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam misalnya masih diasosiasikan dengan pembatasan jumlah anak, terkait dengan misi/ isu kristenisasi dsb.<sup>6</sup> Pandangan-pandangan yang salah serupa ini tentu perlu diluruskan, sebab akan menghambat pelaksanaan program-program kependudukan Pemerintah Indonesia dan salah satu jalan untuk meluruskan yang efektif adalah melalui pendidikan.

Dari hasil observasi awal peneliti ke SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh, sebagai sekolah model/ percontohan program Sekolah Siaga Kependudukan di Provinsi Aceh, didapatkan data awal bahwa pelaksanaan program ini masih menemui banyak kendala, baik terkait dengan fasilitas yang disediakan BKKBN Perwakilan Aceh,

---

Siaga Kependudukan," accessed April 15, 2018, <http://www.ipkbkaltim.com/bkkbn-kaltim-launching-sekolah-siaga-kependudukan.html>.

<sup>6</sup> Anton Widyanto et al., "Keluarga Berencana Dalam Perspektif Sosio-Kultural Masyarakat Syariat (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Aceh Terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi)," *Jurnal Keluarga Berencana* 2, no. 1 (February 14, 2018): 22-33, <http://jurnalkb.org/ojskb2481/index.php/kb/article/view/10>.

maupun strategi integrasi materi kependudukan dalam mata pelajaran. Bahkan masih terdapat perbedaan pandangan apakah integrasi materi kependudukan perlu dilaksanakan, ataukah cukup hanya dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler.<sup>7</sup> Kondisi ini berbeda dengan data-data yang didapat di sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bojonegoro, sebagai salah satu sekolah model yang menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Provinsi Jawa Timur. Di MAN 1 Bojonegoro, program SSK dilaksanakan secara kreatif dan inovatif. Demikian pula desain Pojok Kependudukan telah diterapkan secara menarik dan inovatif.<sup>8</sup>

Terkait dengan fakta-fakta di atas, dalam konteks pendidikan salah satu aspek yang penting sekali diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan adalah aspek integrasi kurikulum. Di dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum didefinisikan sebagai *“seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan*

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala dan Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 10 Fajar Harapan, 5/9/2018.

<sup>8</sup>“MAN 1 Bojonegoro, Sekolah Siaga Kependudukan,” accessed September 30, 2018, <http://blokbojonegoro.com/2018/07/25/man-1-bojonegoro-sekolah-siaga-kependudukan/>; “MAN Model Bojonegoro Gelar Sastra Pelataran.”

*pendidikan tertentu*". Dengan demikian maka konsep pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di lembaga pendidikan formal tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang kurikulum, sebab tanpa desain kurikulum yang benar, maka bukan tidak mungkin justru pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan akan menemui banyak kendala, sehingga alih-alih ditujukan untuk mensukseskan program-program kependudukan, justru bisa menimbulkan persoalan tersendiri.

Sejalan dengan pemikiran di atas, salah satu mata pelajaran penting yang dipelajari di sekolah formal adalah Pendidikan Agama Islam (PAI). Mata pelajaran ini merupakan bagian upaya terstruktur untuk menanamkan nilai-nilai Islami sehingga bisa mewujudkan tujuan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. PAI menduduki peran yang penting termasuk untuk menanamkan nilai-nilai kependudukan pada generasi muda. Namun demikian dalam pelaksanaannya tentu diperlukan upaya-upaya serta desain yang sistematis dan terstruktur.

Dari penelusuran literatur yang peneliti lakukan, sayangnya kajian-kajian akademis dan ilmiah melalui penelitian mengenai hal ini, khususnya terkait dengan pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal dalam mengintegrasikan materi kependudukan pada mata pelajaran

PAI melalui program Sekolah Siaga Kependudukan masih belum ditemukan. Oleh sebab itulah maka penelitian berikut akan mengisi kekosongan yang ada, sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam kerangka penguasaan program nasional Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan isu kependudukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah terletak pada proses integrasi materi kependudukan dalam Pendidikan Agama Islam melalui program Sekolah Siaga Kependudukan di Aceh dan Jawa Timur melalui pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, studi berikut ini dilaksanakan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian meliputi:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan di Aceh dan Jawa Timur?
2. Apa saja kendala yang dihadapi sekolah dalam mengintegrasikan materi kependudukan dalam Pendidikan Agama Islam melalui program Sekolah Siaga Kependudukan di Aceh dan Jawa Timur?
3. Bagaimana bentuk pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan berbasis kearifan lokal yang bisa



dijalankan untuk memperkuat Sekolah Siaga Kependudukan di Aceh dan Jawa Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi integrasi materi kependudukan dalam Pendidikan Agama Islam melalui program Sekolah Siaga Kependudukan di Aceh dan Jawa Timur berbasis kearifan lokal, sehingga dengan demikian dapat lebih efektif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang dirancang BKKBN.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan di Aceh dan Jawa Timur;
- b. Untuk memetakan kendala yang dihadapi sekolah dalam proses pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan di Aceh dan Jawa Timur khususnya terkait dengan integasi materi kependudukan di dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam;
- c. Untuk merumuskan pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal yang bisa dijalankan untuk

memperkuat Sekolah Siaga Kependudukan di Aceh dan Jawa Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoretis penelitian berikut sangat penting sebagai bahan pijakan dan masukan konstruktif untuk mendesain implementasi program Sekolah Siaga Kependudukan di Indonesia, khususnya terkait dengan penyadaran peserta didik di lembaga pendidikan formal tentang isu-isu kependudukan. Adapun secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan kepada berbagai pihak sebagai berikut:

##### **1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah Jawa Timur (Eksekutif dan Legislatif)**

Penelitian berikut bisa menjadi pedoman untuk melahirkan kebijakan-kebijakan baru di dalam pengelolaan program kependudukan di Aceh dan Jawa Timur. Di antara *output* nyata hasil penelitian ini nantinya dalam bentuk policy brief yang akan didiseminasikan juga kepada Pemerintah Aceh dan Pemda Jawa Timur, sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi pijakan secara politis di dalam menindaklanjuti penguatan konsep Sekolah Siaga Kependudukan di kedua provinsi ini.

**2. BKKBN Pusat, BKKBN Provinsi Aceh dan BKKBN Provinsi Jawa Timur.**

Hasil penelitian ini juga sangat penting sebagai bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi BKKBN Nasional, BKKBN Perwakilan Aceh dan BKKBN Perwakilan Jawa Timur dalam proses pengembangan program Sekolah Siaga Kependudukan yang efektif melalui pendekatan kearifan lokal.

**3. Lembaga Pendidikan di Aceh, Jawa Timur dan para pemerhati isu kependudukan.**

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat di dalam merancang model Sekolah Siaga Kependudukan, sehingga memungkinkan bagi lembaga-lembaga pendidikan formal di Aceh dan Jawa Timur untuk ikut serta dalam pengembangan dan penguatan program Sekolah Siaga Kependudukan. Lebih lanjut lagi hasil penelitian ini juga akan sangat bermanfaat bagi para peneliti, akademisi, maupun pihak-pihak lain yang *concern* dengan isu-isu kependudukan nasional, sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana dipaparkan di dalam latar belakang masalah di atas bahwa integrasi program kependudukan yang dicanangkan BKKBN melalui Sekolah Siaga Kependudukan telah dimulai beberapa tahun yang lalu. Program ini juga sudah dilakukan di beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia. Namun demikian sejauh penelusuran peneliti, belum banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan fenomena ini.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, penelitian terkait dengan signifikansi pendidikan kependudukan melalui lembaga pendidikan formal sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Debebe <sup>9</sup> yang menyoroti permasalahan pendidikan kependudukan dalam konteks negara Ethiopia, adalah salah satu diantaranya. Debebe mengatakan bahwa pendidikan kependudukan menduduki posisi yang sangat penting dalam pengendalian jumlah penduduk. Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dan kesejahteraan. Dalam konteks negara Ethiopia, penelitian Debebe menyimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk dari 6,4 kelahiran per perempuan di

---

<sup>9</sup> Debebe, "Population Education , Fertility and Family Planning in Ethiopia."

tahun 1990, menjadi 4,8 kelahiran per perempuan Ethiopia pada tahun 2011.

Studi Debebe di atas juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Slovenia. Perkembangan penduduk merupakan faktor yang signifikan di Slovenia. Oleh sebab itu Pendidikan kependudukan perlu diajarkan dari tingkat dasar, menengah dan Pendidikan tinggi. Salah satu tantangan bagi lembaga pendidikan adalah terutama untuk menyesuaikan program pendidikan kependudukan dengan situasi-situasi baru yang disebabkan oleh perubahan demografis<sup>10</sup>.

Dalam konteks Indonesia, Muhammad Ancha Sitorus<sup>11</sup> berpendapat bahwa bangsa Indonesia ke depan akan menghadapi suatu fenomena besar dengan proporsi penduduk usia produktif berada pada jumlah tertinggi akan menurunkan angka ketergantungan (dependency ratio) yang berdampak pada pembangunan ekonomi. Pemahaman penduduk usia muda mengenai kependudukan melalui jalur formal di sekolah diharapkan dapat membantu agar mampu mempersiapkan diri untuk memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan sikap perilaku berwawasan kependudukan. Kewaspadaan akan

---

<sup>10</sup> Žiga and Bojnec, "Population, Education and Socio-Economic Development in Slovenia."

<sup>11</sup> Muhammad Ancha Sitorus, "Integrasi Pendidikan Kependudukan Kedalam Kurikulum Dalam Rangka Pencapaian Target Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 1*, no. 1 (2017): 20–24, <http://semnastafis.unimed.ac.id>.

dampak kependudukan oleh penduduk usia muda akan membantu pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) pada Tahun 2030. Pendidikan kependudukan yang terintegrasi dalam kurikulum merupakan salah satu upaya strategis dengan membahas materi kependudukan seperti jumlah penduduk, penduduk remaja, usia produktif, penduduk lansia, urbanisasi dan pembangunan perkotaan yang diintegrasikan dengan mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan. Prinsip pembelajaran terpadu pendidikan kependudukan dalam kurikulum diawali dengan penggalan tema, proses pembelajaran dengan guru yang berperan aktif sebagai fasilitator dan mediator dan mengakomodir ide peserta didik, melakukan evaluasi bersama dalam ketercapaian belajar sesuai dengan kriteria tujuan yang telah ditetapkan, serta reaksi guru terhadap aksi siswa dalam yang mengarah pada suatu kesatuan pemahaman yang utuh. Guru menuangkan materi pendidikan kependudukan ke dalam Garis-garis Besar Program pengajaran (GBPP), program tahunan, satuan pembelajaran terpadu, dan penyajian materi dengan strategi belajar yang inovatif.

Beberapa penelitian terkait lain terkait dengan isu kependudukan yang dilakukan secara sosiologis, terutama berhubungan dengan remaja usia sekolah juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Di antara beberapa penelitian

tersebut menawarkan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja usia sekolah. Masalah kesehatan reproduksi sudah menjadi masalah klasik di Indonesia yang belum memiliki formula khusus untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu orang tua, sekolah, dan teman sebaya harus menjadi partner bersama dalam menyelesaikan masalah ini. Seperti yang ditunjukkan Siti Masfiah, bahwa pendidikan reproduksi sejatinya harus terintegrasi ke dalam pendidikan sekolah melalui kurikulum<sup>12</sup>. Hal ini terlihat sejalan dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh BKKBN melalui berbagai programnya, terutama sekali Sekolah Siaga Kependudukan. Hanya saja, Siti Masfiah tidak dengan tegas menunjukkan bentuk-bentuk yang dapat dilakukan dalam integrasi tersebut. Hal yang lebih spesifik diberikan oleh Gurendro Putro<sup>13</sup> yang menawarkan beberapa alternatif pengembangan model kesehatan reproduksi bagi remaja. Selain itu adalah juga

---

<sup>12</sup> Siti Masfiah, Zahroh Shaluhiah, and Antono Suryoputro, "Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) Dalam Kurikulum SMA Dan Pengetahuan & Sikap Kesehatan Reproduksi Siswa," *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 8, no. 1 (2013): 69-78, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=476107&val=1285&title=Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja \(PKRR\) Dalam Kurikulum SMA Dan Pengetahuan & Sikap Kesehatan Reproduksi Siswa](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=476107&val=1285&title=Pendidikan%20Kesehatan%20Reproduksi%20Remaja%20(PKRR)%20Dalam%20Kurikulum%20SMA%20Dan%20Pengetahuan%20&20Sikap%20Kesehatan%20Reproduksi%20Siswa).

<sup>13</sup> Gurendro Putro, "Alternatif Pengembangan Model Kesehatan Rerproduksi Remaja Tahun 2009," *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 1 (2010): 23-31.

tawaran dari Herlin <sup>14</sup> tentang posisi teman sebaya dalam pendidikan kesehatan reproduksi anak.

Pendekatan lain yang dilakukan peneliti sejauh ini adalah kajian-kajian terkait dengan perilaku seksual remaja. Dalam hal ini beberapa peneliti mencoba menunjukkan berbagai perilaku seksual remaja di berbagai daerah di Indonesia. Fisabella <sup>15</sup> misalnya menunjukkan perilaku seksual pranikah yang dilakukan remaja disebabkan relasi yang buruk mereka dengan orang tua. Mereka melakukannya dengan pacar. Relasi dalam berpacaran sendiri membuat banyak remaja tidak lagi peduli pada “harga diri” dalam menjaga kesucian <sup>16</sup>. Sementara itu Yuli Trisnawati <sup>17</sup> menunjukkan enam faktor terjadinya perilaku seksual pranikah pada remaja,

---

<sup>14</sup> Herlin Fitriani Kurniawati and Zahroh Shaluhayah, “Pengetahuan Pendidik Sebaya Mempengaruhi Pemberian Informasi KRR Di Kabupaten Kulon Progo,” *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 9, no. 2 (2014): 162–72.

<sup>15</sup> Fisabella Dea Migiana and Dinie Ratri Desiningrum, “Seks Pranikah Bagi Remaja: Studi Fenomenologis Pada Remaja Yang Melakukan Hubungan Seksual Pranikah,” *Jurnal Empati* 4, no. 1 (2015): 88–93, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=463318&val=4725&title=SEKS PRANIKAH BAGI REMAJA: Studi Fenomenologis pada Remaja yang Melakukan Hubungan Seksual Pranikah>.

<sup>16</sup> Fridya Mayasari and M. Noor Rochman Hadjam, “Perilaku Seksual Remaja Dalam Berpacaran Ditinjau Dari Harga Diri Berdasarkan Jenis Kelamin,” *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2000): 120–27, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=260597&val=7039&title=PERILAKU SEKSUAL REMAJA DALAM BERPACARAN DITINJAU DARI HARGA DIRI BERDASARKAN JENIS KELAMIN>.

<sup>17</sup> Yuli Trisnawati, Tri Anasari, and Artathi Eka S., “Perilaku Seksual Remaja SMA Di Purwokerto Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya,” *Bidan Prada: Jurnal Publikasi Kebidanan Akbid YLPP Purwokerto* 1, no. 01 (2010): 1–15, <http://ojs.akbidylpp.ac.id/index.php/Prada/article/view/36/34>.



yaitu tingkat pengetahuan, sikap terhadap seksualitas, sikap terhadap pelayanan kesehatan reproduksi remaja, peran orangtua, perilaku seksual teman sebaya, dan akses dengan media pornografi. Hasil penelitian Yuli ini juga ditegaskan beberapa peneliti lain.<sup>18</sup> Selain itu beberapa peneliti lain membaginya ke dalam beberapa faktor internal dan faktor eksternal.<sup>19</sup> Beberapa solusi atas permasalahan ini diberikan oleh peneliti.

Fokus lain yang banyak dikaji selama ini adalah masalah perkawinan di bawah umur/ pernikahan dini. Persoalan ini juga sebenarnya merupakan salah satu bagian yang ingin dicegah melalui program Sekolah Siaga Kependudukan.

Secara umum, pendewasaan usia perkawinan masih menjadi persoalan tersendiri di Indonesia. Hasil penelitian Elisa Sefriyana dkk terkait perkawinan di bawah umur di Desa Pringombo tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 17% kasus

---

<sup>18</sup> Tyas Retno Wulan and Muslihudin Muslihudin, "Perilaku Seksual Remaja Di Pedesaan (Studi Tentang Perilaku Seks Dan Reproduksi Sehat Remaja Di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)," *Jurnal Pembangunan Pedesaan* 3, no. 2 (2003): 81-90,

<http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Pembangunan/article/viewFile/52/51>; Sarma Eko Natalia Sinaga, "Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Pada Mahasiswa Akademi Kesehatan x Di Kabupaten Lebak," *Archive of Community Health* 2, no. 1 (2013): 50-55.

<sup>19</sup> ayu khoiril Umaroh, "Hubungan Antara Faktor Internal Dan Eksternal Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja Indonesia," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 10 (2015): 65-75; Komang Yuni Rahyani et al., "Perilaku Seks Pranikah Remaja," *Kesmas: National Public Health Journal* 7, no. 4 (2017): 180, <https://doi.org/10.21109/kesmas.v7i4.53>.

pernikahan usia muda tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan terjadi penyimpangan administrasi berupa pemalsuan usia nikah calon mempelai. Hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan masih belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat <sup>20</sup>. Untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, berbagai kebijakan dalam bentuk regulasi telah dikeluarkan di berbagai negara <sup>21</sup>, termasuk di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada dasarnya memuat ketentuan pendewasaan perkawinan.

Terkait hal ini, kebanyakan peneliti menempatkan masalah perkawinan di bawah umur sebagai masalah sosial

---

<sup>20</sup> Elisa Seftriyana, Adelina Hasyim, and Yunisca Nurmalisa, "IMPLEMENTASI UU PERKAWINAN TENTANG PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA PRINGOMBO TAHUN 2015," *Jurnal Kultur Demokrasi* 3, no. 1 (2015),

<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/7567>.

<sup>21</sup> Stephen A Adebawale and Martin E Palamuleni, "Determinants of Unmet Need for Modern Contraception and Reasons for Non-Use among Married Women in Rural Areas of Burkina Faso," *African Population Studies* 28, no. 1 (2014); Dirgha J Ghimire and William G Axinn, "Marital Processes, Arranged Marriage, and Contraception to Limit Fertility," 2013, <https://doi.org/10.1007/s13524-013-0221-5>; Nabanita Majumder and Faujdar Ram, "Explaining the Role of Proximate Determinants on Fertility Decline among Poor and Non-Poor in Asian Countries," n.d., <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115441>; Donald H Minkler et al., "Health Care Delivery Family Planning Among Southeast Asian Refugees," n.d.; Kathryn M Yount et al., "Fertility Decline, Girls' Well-Being, and Gender Gaps in Children's Well-Being in Poor Countries," *Demography* 51 (2014): 535-61, <https://doi.org/10.1007/s13524-014-0282-0>.

yang perlu dicarikan solusi. Kebanyakan peneliti memandang masalah perkawinan di bawah umur telah menjadi masalah urgen untuk diselesaikan. Hal ini terjadi bukan hanya di desa, namun juga di kota di mana masyarakatnya lebih terdidik<sup>22</sup>. Perkawinan di bawah umur serupa ini berpengaruh pada kesejahteraan keluarga<sup>23</sup>. Sementara peneliti lain menekankan perkawinan di bawah umur dan hubungannya dengan usia subur<sup>24</sup>. Perkawinan di bawah umur menjadi masalah juga dalam hubungannya dengan relasi gender di dalam masyarakat dan kesakralan sebuah pernikahan .

Dari beberapa fokus studi yang dilakukan para peneliti di atas terlihat bahwa penelitian yang menjadikan Sekolah Siaga Kependudukan sebagai objek penelitian belum pernah dilakukan. Beberapa yang sudah ada masih dalam kerangka umum program penyuluhan BKKBN yang ada di sekolah-sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kajian yang penting ini luput dari jangkauan peneliti. Padahal kalau berkaca pada dunia Barat, kajian-kajian model “siaga kependudukan” sudah

---

<sup>22</sup> I Made Pasek Artono, “Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus Fenomena Pernikahan Dini Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Antropologi Kesehatan),” *Humanis* 15, no. 2 (2016): 48–54.

<sup>23</sup> Umi Sumbulah, “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender),” *Egalita Jurnal Kesehatan Dan Keadilan Gender* VII (2012): hlm. 83-101.

<sup>24</sup> Sesi Nofridayati, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado,” *Jikmu* 5, no. 2 (2015): 270–80.

banyak dilakukan<sup>25</sup> dan telah menjadi sebuah mekanisme menyelesaikan masalah kependudukan.

## **B. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Kurikulum**

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas dari sebuah kurikulum, karena kurikulum memegang peranan penting untuk menyukseskan proses belajar mengajar dalam sebuah lembaga pendidikan. Istilah kurikulum yang dikenal luas adalah sejumlah perangkat pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam sebuah jenjang pendidikan<sup>26</sup>, atau perangkat pembelajaran yang diberikan pada lembaga pendidikan.<sup>27</sup> Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Currere* berarti jarak tempuh lari, jarak yang harus ditempuh dalam perlombaan lari mulai dari *start* hingga *finish*. Dalam

---

<sup>25</sup> Mahmood, "The Demographic Dividend: Effects of Population Change on School Education in Pakistan"; Davies, "Population Education"; E Osemwengie and E Margaret, "Population Education in Nigeria: Purpose, Content and Problems," n.d.; Lutz, "Population, Education and the Sustainable Development Goals"; United Nations, *Population, Education and Development*, New York (New York: United Nations, 2003), <https://doi.org/92-1-151382-0>.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 1-2.

<sup>27</sup> Oemar Muhammad Toumy Al-Syaibany, *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hassan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 478.

bahasa Arab, kurikulum disebut *manhaj*, yaitu jalan yang terang yang ditempuh oleh manusia dalam kehidupannya.<sup>28</sup>

Pengertian kurikulum di atas masih dalam pengertian dasar. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengertian kurikulum juga banyak mengalami perubahan dan pengembangan. Kurikulum merupakan sebuah harapan yang kemudian dituangkan dalam bentuk rencana atau program yang akan dilaksanakan oleh guru di sekolah, kurikulum disusun sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Beberapa pakar pendidikan memberikan beberapa definisi kurikulum yang dianggap sangat komprehensif.

Permasalahan pokok mengenai kurikulum adalah bagaimana mendesain kurikulum yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang sekaligus menjadi tujuan hidup masyarakat. Hal ini penting diperhatikan karena pendidikan selalu terkait dengan kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan harus dirancang berdasarkan pandangan-pandangan hidup dan sekaligus menjadi tujuan-tujuan hidup masyarakat. Setiap praktik pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, apakah berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, pengembangan pribadi, kemampuan sosial, ataupun kemampuan bekerja.

---

<sup>28</sup> Oemar Muhammad Toumy Al-Syaibany, *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hassan Langgulong (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 478.

## 2. Kurikulum Terintegrasi (*integrated curriculum*)

Kurikulum Terintegrasi lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus *integrated* atau terpadu secara menyeluruh. Keberadaan proses pembelajaran tidak terfokus pada mempelajari mata pelajaran-mata pelajaran, melainkan mata pelajaran-mata pelajaran itu hanya dijadikan sarana untuk mendekati permasalahan yang menjadi fokus kajian. Hal ini, dapat memungkinkan setiap peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing, dan secara psikologis dapat menjadi sarana pengembangan pribadi yang utuh.<sup>29</sup> Namun mata pelajaran yang diampu oleh pendidik saat mata pelajaran berlangsung menjadi pedoman dan pusat pengintegrasian topik, sehingga ruh pembelajaran dan pengajaran tidak meninggalkan mata pelajaran yang telah ditentukan pemerintah untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional.

Pengembangan kurikulum terintegrasi memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan peserta didik dalam mengembangkan program pembelajaran. Bahan pelajaran dalam kurikulum ini akan bermanfaat secara fungsional

---

<sup>29</sup> Muhammad Ali, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 58.

serta dalam pembelajaran akan dapat membentuk kemampuan peserta didik secara proses maupun produk. Bahan pelajaran selalu aktual sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun peserta didik sebagai individu yang utuh sehingga bahan pelajaran yang dipelajari selalu sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik.<sup>30</sup> Kurikulum ini juga mempertimbangkan semua aspek, sesuai dengan sistem kepercayaan, sistem nilai, sistem kebutuhan yang terpadu dalam masyarakat.

Dalam kurikulum terintegrasi, pelajaran disesuaikan dengan kehidupan peserta didik di luar sekolah yaitu kehidupan nyata, *“The concept of integrated curricula continues the conversation with practical ways to transform that learning into real-life experiences that transfer effortlessly into future applications”*.<sup>31</sup> Belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Masalah tersebut kemudian dinamakan unit. Belajar berdasarkan unit bukan hanya menghafal sejumlah fakta, akan tetapi juga mencari dan menganalisis fakta sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Belajar melalui pemecahan masalah itu diharapkan perkembangan peserta

---

<sup>30</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 65.

<sup>31</sup> Robin Fogarty, *How to Integrate the Curricula* (USA: CorwinPress, 2009), 7.

didik tidak hanya terjadi pada segi intelektual saja akan tetapi seluruh aspek seperti sikap, emosi, atau keterampilan.<sup>32</sup>

Model kurikulum terintegrasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi pengintegrasian kurikulum, sebagai berikut: (1). *Pengintegrasian di dalam Satu Disiplin Ilmu*. Model ini merupakan integrasi yang mentautkan dua atau lebih bidang ilmu yang serumpun. Misalnya di bidang Ilmu Alam, mentautkan antara dua tema dalam fisika dan biologi yang memiliki relevansi, atau antara tema dalam kimia dan fisika. Contoh: tema metabolisme dapat ditinjau dari biologi maupun kimia. Begitupun dengan tema-tema yang relevan pada Ilmu Sosial seperti antara sosiologi dan geografi. Jadi sifat perpaduan dalam model ini hanya dalam satu rumpun bidang ilmu saja (*inter-disipliner*); (2) *Pengintegrasian Beberapa Disiplin Ilmu*. Model ini merupakan integrasi yang mentautkan antar disiplin ilmu yang berbeda. Misalnya antara tema yang ada dalam bidang ilmu sosial dengan bidang ilmu alam. Sebagai contoh, tema energi merupakan tema yang dapat dikaji dari bidang ilmu yang berbeda baik dalam bidang ilmu sosial (tentang kebutuhan energi dalam masyarakat), dan bidang ilmu alam (tentang bentuk-bentuk energi dan teknologinya); (3) *Pengintegrasian di dalam Satu dan Beberapa*

---

<sup>32</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Kencana, 2009), 67.



*Disiplin Ilmu.* Model ini merupakan integrasi yang paling kompleks karena mentautkan antar disiplin ilmu yang serumpun sekaligus bidang ilmu yang berbeda. Misalnya, antara tema yang ada dalam bidang ilmu sosial, bidang ilmu alam, teknologi maupun ilmu agama. Sebagai contoh, tema rokok merupakan tema yang dapat dikaji dari berbagai bidang ilmu yang berbeda.<sup>33</sup>

Secara ideal hasil yang diinginkan dalam pengembangan kurikulum ini membentuk kemampuan peserta didik yang terintegrasi yang menggambarkan manusia yang harmonis sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun sesuai dengan tuntutan potensi peserta didik. Kemampuan dalam memecahkan masalah secara ilmiah merupakan bagian dari karakteristik pembelajaran dalam kurikulum ini. Masalah yang diselesaikan biasanya berkaitan dengan masalah sosial, pekerjaan, maupun masalah-masalah yang sifatnya aktual. Dengan demikian, informasi dan kemampuan yang dipelajari peserta didik akan selalu sesuai dengan perkembangan sosial budaya maupun dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan kurikulum ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik.

---

<sup>33</sup> Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 40.

### 3. Pengembangan Kurikulum Terintegrasi

Dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum terintegrasi, maka harus mengacu pada proses pengembangan kurikulum, sehingga akan didapat alur pengembangan kurikulum terintegrasi sebagai berikut: (1) perencanaan kurikulum terintegrasi, (2) pelaksanaan kurikulum terintegrasi, dan (3) evaluasi kurikulum terintegrasi.

#### 1) Perencanaan Kurikulum Terintegrasi

Untuk menyusun perencanaan kurikulum terintegrasi, maka harus memperhatikan bentuknya sebagai berikut: *Pertama*, unit merupakan satu kesatuan dari seluruh bahan pelajaran. Faktor yang menyatukan adalah masalah-masalah yang akan diselidiki dan dipecahkan oleh peserta didik. Segala aktivitas peserta didik harus berkaitan dengan pokok masalah tersebut. Seluruh bahan pelajaran dipergunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi; *Kedua*, unit didasarkan pada kebutuhan peserta didik, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, baik yang menyangkut jasmani dan rohani. Kebutuhan peserta didik biasanya ditentukan oleh latar belakang masyarakatnya; *Ketiga*, dalam unit peserta didik dihadapkan pada berbagai situasi yang mengandung permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan dikaitkan dengan pelajaran

di sekolah sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik; *Keempat*, unit mempergunakan dorongan-dorongan sewajarnya pada diri peserta didik dengan melandaskan diri pada teori-teori belajar. Peserta didik diberi kesempatan melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan minatnya. Dalam merancang unit peserta didik juga harus diikutsertakan untuk menentukan pokok-pokok masalahnya. *Kelima*, pelaksanaan unit sering memerlukan waktu yang relatif lebih lama daripada pelajaran biasa di kelas.

## 2) Pelaksanaan Kurikulum Terintegrasi

Kegiatan proses belajar mengajar erat kaitannya dengan tugas-tugas seorang guru, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: (a) menyusun rencana pelaksanaan program/unit, (b) menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pelajaran, (c) pengisian daftar penilaian kemajuan belajar dan perkembangan peserta didik, dan (d) pengisian buku laporan pribadi peserta didik. Dalam pendekatan pelaksanaan kurikulum terintegrasi, peserta didik adalah pembuat keputusan dan para pemecah masalah. Proses dipandang sebagai sentral untuk menjelaskan tingkah laku. Peserta didik itu berbeda satu sama lain,

sedangkan masalah merupakan kunci dimana proses dimulai, karena itu pula cara penyelesaian masalah pun berbeda satu sama lain, tidak ada dua cara yang sama. Para peserta didik bukan saja dikembangkan sebagai suatu kepribadian yang bulat, akan tetapi juga dipersiapkan sebagai pribadi yang mampu berperan di masyarakat. Selain dari itu, pendekatan ini memungkinkan kerjasama antara sekolah dan masyarakat.<sup>34</sup> Dalam pelaksanaan kurikulum ini guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengimplementasikan berbagai strategi belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik kurikulum tersebut. Pembelajaran yang mungkin banyak digunakan seperti pemecahan masalah, metode proyek, pengajaran unit, *inquiry*, *discovery*, dan pendekatan tematik yang dilakukan dalam pembelajaran kelompok maupun secara perorangan. Pembelajaran tematik juga merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu (*integrated instruction*) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik,

---

<sup>34</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: UPI dan PT Remaja Rosdakarya, 2008), 60-62.

bermakna dan autentik. Pendekatan pembelajaran terpadu lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (*learning by doing*). Peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya.<sup>35</sup>

Secara lebih rinci menurut Lias Hasibuan, penyajian kurikulum terintegrasi dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. "*Unit curriculum*", yaitu kurikulum unit dimana pada tingkat tertentu mengintegrasikan sejumlah mata pelajaran dan difungsikan menjadi suatu komponen untuk mengkaji suatu topik yang sedang dipelajari, pembelajarannya dengan pendekatan multi disipliner.
- b. "*Project curriculum*", yaitu kurikulum dimana materi tertentu yang relevan dari mata pelajaran dipadukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam proses kegiatan belajar-mengajar atau untuk memecahkan suatu masalah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Rusman, *Manajemen...*, 63

<sup>36</sup> Lias Hasibuan, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 58.

### 3) Evaluasi Kurikulum Terintegrasi

Evaluasi pengembangan kurikulum dapat dipandang sebagai proses pembuatan keputusan-keputusan tentang kurikulum di dalam sekolah atau proses pengajaran yang dibatasi oleh minat-minat pihak luar, seperti orang tua, karyawan, masyarakat lokal atau masyarakat luas.<sup>37</sup> Peranan evaluasi kurikulum bagi pimpinan, berkenaan dengan hal yaitu: evaluasi sebagai moral *judgement*, evaluasi dan penentuan keputusan, serta evaluasi dan konsensus nilai.<sup>38</sup> Bagi guru, penyelenggaraan evaluasi hasil penerapan pengembangan kurikulum dalam satu semester, yaitu: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Kedua jenis evaluasi ini dilaksanakan oleh guru dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan proses penerapan kurikulum di kelas.<sup>39</sup>

### C. Definisi Operasional

Sesuai dengan fokus masalah penelitian yang diangkat, terdapat beberapa kata kunci yang perlu diperjelas terlebih dahulu baik sebagai batasan penelitian

---

<sup>37</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan...*, 141.

<sup>38</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 180.

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT Bima Karya, 1987), 142.

maupun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang arah penelitian berikut:

### **1. Sekolah Siaga Kependudukan**

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah salah satu bentuk konsep integrasi program kependudukan melalui lembaga pendidikan formal. Melalui keberadaan Sekolah Siaga Kependudukan ini diharapkan nantinya para generasi muda di Indonesia memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu kependudukan baik terkait dengan keluarga berencana maupun pembinaan keluarga sejahtera sehingga dapat mendukung kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan Sekolah Siaga Kependudukan adalah sekolah SMAN Fajar Harapan Banda Aceh, Provinsi Aceh dan MAN Model Bojonegoro, Jawa Timur.

### **2. Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan secara integratif seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, dalam hal ini terkait dengan materi kependudukan dalam program Sekolah Siaga Kependudukan.

### **3. Kearifan Lokal (*local wisdom*)**

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Menurut Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Akhmar dan Syarifudin<sup>40</sup> kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah tata nilai yang dipedomani masyarakat Aceh dan masyarakat Jawa Timur.

---

<sup>40</sup> Andi M. Akhmar dan Syarifuddin, "Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua", Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, 2007.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Rancangan Model Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus. Model penelitian ini ditujukan untuk memetakan masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan yang melaksanakan program Sekolah Siaga Kependudukan, serta diarahkan untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah dan kendala yang dihadapi oleh lembaga pendidikan tersebut.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di dua sekolah yang sudah menjalankan program Sekolah Siaga Kependudukan di Indonesia meliputi:

- a. SMA Negeri 10 Fajar Harapan: Sekolah Menengah Atas ini terletak di Kota Banda Aceh. Sekolah ini dijadikan sebagai salah satu model Sekolah Siaga Kependudukan di Provinsi Aceh.
- b. MAN Model (MAN 1) Bojonegoro: Madrasah Aliyah Negeri ini terletak di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Sekolah ini juga merupakan sekolah model

tempat pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di Provinsi Jawa Timur.

Pemilihan kedua lokasi penelitian di atas dirasa penting karena sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini, yaitu mengkaji isu-isu yang berhubungan dengan proses integrasi materi kependudukan dalam Pendidikan Agama Islam melalui program Sekolah Siaga Kependudukan. Kedua sekolah yang berbeda ini (satu di bawah Kementerian Pendidikan Nasional dan satu lagi di bawah Kementerian Agama RI) juga penting karena geografis sekolah yang berbeda akan memungkinkan terjadinya proses penguatan yang berbeda pula berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah.

### **3. Informan/Subyek Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu mengkaji proses penguatan Sekolah Siaga Kependudukan, maka peneliti perlu mengumpulkan data-data dan informasi dari pihak-pihak terkait, dengan harapan akan ditemukan hasil penelitian yang dapat menjawab fokus permasalahan yang diangkat dalam kajian ini. Adapun informan di tiap-tiap lokasi penelitian meliputi:

1. Kepala Sekolah
2. Kepala Bidang Kurikulum

3. Perwakilan Guru
4. Perwakilan Komite Sekolah
5. Perwakilan BKKBN
6. Perwakilan siswa

Mengenai gambaran jumlah informan dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

**TABEL 1**  
**URAIAN TENTANG INFORMAN**

No	Unsur	Jumlah	Ket
1	Kepala Sekolah	2 orang	1 orang dari masing-masing sekolah (SMA Fajar Harapan dan MAN 1 Bojonegoro)
2	Kepala Bidang Kurikulum	2 orang	1 orang dari masing-masing sekolah (SMA Fajar Harapan dan MAN 1 Bojonegoro)
3	Guru	8 orang	4 orang dari masing-masing sekolah (SMA Fajar Harapan dan MAN 1 Bojonegoro)
4	Komite Sekolah	4 orang	2 orang dari masing-masing sekolah (SMA Fajar Harapan

			dan MAN 1 Bojonegoro)
5	BKKBN	2 orang	1 orang dari masing-masing kabupaten/kota
6	Siswa	10 orang	5 orang dari masing-masing sekolah (SMA Fajar Harapan dan MAN 1 Bojonegoro)
<b>Total</b>		<b>28 rang</b>	

## B. Metode Pengumpulan Data

Dari prosedur penelitian yang telah dipaparkan di atas, terlihat ada tiga metode pengumpulan data yang akan digunakan di dalam penelitian ini.

### 1. Wawancara

Metode ini merupakan metode inti yang digunakan di dalam penelitian ini. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan subjek penelitian sebanyak masing-masing 1 kali wawancara mendalam atau *in-depth semi structure interview*. Namun, pertanyaan-pertanyaan wawancara yang akan diajukan kepada setiap informan memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Misalnya, untuk kepala sekolah dan perwakilan BKKBN akan ditanyakan

informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk penguatan Sekolah Siaga Kependudukan ini. Sedangkan untuk Kepala Bidang Kurikulum akan digali informasi mengenai metode integrasi kurikulum kependudukan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

## **2. *Focus Group Discussion***

Selain wawancara, informasi untuk menjawab permasalahan penelitian ini juga digali melalui Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*). Peneliti merasa perlu melakukan metode ini untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Beberapa informan akan dikelompokkan ke dalam beberapa grup. Dua FGD yang akan dilaksanakan terdiri siswa, guru dan komite sekolah.

## **3. *Observasi***

Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang penting di dalam pendekatan kualitatif juga akan digunakan peneliti dalam studi berikut. Observasi yang dilakukan ditujukan untuk mengumpulkan data-data terkait dengan pelaksanaan pembelajaran materi-materi kependudukan yang diintegrasikan dalam pelajaran

Pendidikan Agama Islam maupun pelajaran-pelajaran yang lain; respon siswa ketika proses pembelajaran dilaksanakan; dan strategi guru dalam menyampaikan pelajaran.

#### **4. Teknik Dokumentasi/Dokumenter**

Penelitian ini juga akan mengkaji dokumen yang berhubungan dengan integrasi materi kependudukan yang sudah dilaksanakan, desain kurikulum, desain pembelajaran, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan implementasi program Sekolah Siaga Kependudukan di kedua lokasi penelitian yang ditetapkan.

### **C. Metode Analisis Data**

Analisis data akan dilakukan menggunakan metode analisa data kualitatif. Data dari wawancara dan FGD akan ditranskripsi secara verbatim, serta dilakukan kodifikasi dengan tiga tahapan: *Open Coding*, *Axial Coding*, dan *Selective Coding*. Lebih lanjut lagi dalam proses analisis juga akan dilakukan melalui triangulasi, baik triangulasi data (*data triangulation*) maupun triangulasi sumber. Dalam hal ini akan dilakukan pengecekan silang antara data yang didapatkan melalui wawancara, FGD, observasi maupun dokumentasi. Pengecekan sedemikian rupa ini ditujukan

agar validitas data yang dipaparkan nantinya bisa dipertanggungjawabkan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh

SMAN 10 Fajar Harapan berdiri Tahun 2002 dan masih berstatus sebagai sekolah swasta, melalui surat keputusan dengan Nomor: 171/2002, yang ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Agustus 2002, serta ditanda tangani oleh Walikota Banda Aceh Drs. Zulkarnain. Proses belajar mengajar perdana dimulai pada Tahun Pelajaran 2002/2003 dengan jumlah peserta didik perdana 62 orang. Tempat belajar sementara dipusatkan di Yayasan Cut Meutia Banda Aceh. Pada tanggal 15 Desember 2004 SMA Swasta Fajar Harapan ditingkatkan statusnya menjadi SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh, berdasarkan surat keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 450/280/2004, yang ditanda tangani oleh Drs. H. Syarifuddin Latif. Pada tahun 2004 SMAN 10 Fajar Harapan di pindahkan ke lokasi Gampong Ateuk Jawoe Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

SMAN 10 Fajar Harapan merupakan lembaga pendidikan yang menganut sistem *full day* dan pondokan (*Boarding*) yang dipadukan dengan sistem pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam perkembangannya



terus meningkatkan mutu pendidikan, dengan mengasah kemampuan akademik, karakter, dan skill peserta didiknya. Banyak alumni SMAN 10 Fajar Harapan melanjutkan pendidikannya di berbagai universitas terkemuka di Indonesia dan luar negeri.

Visi dan Misi SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Visi**

Unggul dalam prestasi berlandaskan nilai Islami.

**b. Misi**

- 1) Membentuk generasi yang bertakwa kepada Allah Swt
- 2) Mewujudkan generasi yang cerdas berilmu pengetahuan, terampil kreatif, mandiri dan bertanggung jawab.
- 3) Membina generasi yang memiliki jiwa pegabdian pada agama, Negara, masyarakat dan keluarga dengan penuh kejujuran dan keikhlasan.
- 4) Meningkatkan prestasi kerja dengan dilandasi rasa kekeluargaan, keteladanan dan akhlakul karimah.
- 5) Melatih peserta didik dalam penggunaan berbagai multi media.

- 6) Mewujudkan kemampuan peserta didik untuk berkompetisi dalam penulisan karya tulisan ilmiah.
- 7) Melakukan pembinaan pengembangan diri dalam bidang seni, olahraga dan olimpiade.
- 8) Melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional.
- 9) Mengembangkan kegiatan gerakan literasi sekolah.

**c. Tujuan**

- 1) Menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai.
- 2) Melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, berdasarkan semangat keunggulan lokal dan global.
- 3) Meningkatkan kinerja masing-masing komponen sekolah (kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan komite sekolah) untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang inovatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing.
- 4) Meningkatkan program ekstrakurikuler dengan mewajibkan pramuka bagi seluruh warga, agar

lebih efektif dan efisien sesuai dengan bakat dan minat peserta didik sebagai salah satu sarana pengembangan diri siswa.

- 5) Mewujudkan peningkatan kualitas lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang seimbang serta meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
- 6) Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan segala ketentuan yang mengatur operasional warga sekolah.

Meningkatkan kualitas semua sumber daya manusia baik tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik yang dapat berkompetisi baik lokal maupun global.

## **2. MAN Model Bojonegoro**

Sejarah Singkat MAN I Model Bojonegoro, awal kelahirannya berdasarkan SK Menteri Agama No. 17/1968, pada saat itu bernama SP IAIN (Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri) yang berstatus swasta bertempat di Masjid Agung Darussalam Bojonegoro. Lembaga tersebut didirikan bertujuan untuk menampung pemuda-pemuda dalam lembaga Islam, karena pada waktu itu dipandang perlu sekali, karena di daerah ini hanya terdapat sebuah lembaga pendidikan Islam tingkat atas yaitu PGAN. Kemudian mulai tahun ajaran 1979/1980 statusnya berubah menjadi negeri yaitu

Madrasah Aliyah Negeri, bertempat di jalan Monginsidi 160 Bojonegoro. Berdasarkan SK Menteri Agama RI No. IV/PP.06/KEP/174/1998, tanggal 20 Februari 1998 ditetapkan sebagai Madrasah Aliyah Negeri Model. Sekolah ini terletak di jalan Monginsidi No.160 Bojonegoro, Jawa Timur.

Visi Madrasah Terwujudnya madrasah mandiri sebagai Rintisan Madrasah Bertaraf Internasional untuk menciptakan pusat keunggulan dan rujukan (keteladanan) di lingkungan Kementerian Agama dalam kualitas akademik dan non akademik serta akhlak karimah dengan visi; Unggul, Kompetitif, Islami.

Pencapaian visi di atas dijabarkan dalam misi. Secara operasional misi pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Negeri Model Bojonegoro dapat dirumuskan dalam kalimat, "Membina Insan Akademis Yang Religius, Jujur, Disiplin Dan Bersahabat Serta Memiliki Komitmen Mengamalkan Ajaran Islam Dalam Segala Aspek Kehidupan Untuk Mewujudkan Masa Depan Yang Bermutu Dan Diridloi Allah".

Misi ini dijabarkan ke dalam poin-poin sebagai berikut:

- a) Membina anak didik agar memiliki dasar-dasar aqidah, syariah, keluhuran akhlak, kemampuan akademik, pengalaman dan keterampilan menuju kemandirian hidup.

- b) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan seni budaya bernafaskan Islam melalui kegiatan studi lapangan dan penelitian secara berkesinambungan.
- c) Memberikan kasih sayang, dan pelayanan kepada anak didik serta masyarakat dalam menggali ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan nilai-nilai Islam yang dapat menuntun perkembangan individual dalam menjalani hidup yang mandiri, sejahtera dan diridhoi Allah.
- d) Membangun ketauladanan, nasehat, hikmah dan kearifan, menjunjung tinggi nilai Qur'ani dan tradisi Islam yang shohih.
- e) Mendidik generasi berpikir dan bersikap mandiri, kritis, kreatif, pemberani, bertanggung jawab dan berakhlak karimah.
- f) Mengembangkan motivasi, etos kerja dan meningkatkan kualitas kerja dan karya nyata untuk meraih prestasi gemilang yang diridhoi.
- g) Meningkatkan kualitas administrasi pendidikan yang efektif efisien.
- h) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar untuk mencapai prestasi prima.
- i) Meningkatkan kualitas partisipasi *stakeholder* untuk mengembangkan Madrasah Aliyah menuju keunggulan prestasi.<sup>41</sup>

Secara umum tujuan dari MAN Model Bojonegoro adalah:

- a) Terwujudnya lulusan berkualitas akademik, non akademik dan berakhlak mulia,
- b) Terbangunnya budaya madrasah yang membelajarkan dalam satu visi,
- c) Terwujudnya sumber daya manusia madrasah yang memiliki kompetensi integral,

---

<sup>41</sup> Dokumen MAN Model Bojonegoro.

- d) Terlaksananya tata kelola madrasah yang berbasis sistem penjaminan mutu,
- e) Tercipta dan terpelihara lingkungan madrasah yang sehat, kondusif, dan harmonis,
- f) Terbentuknya Stakeholder yang memiliki madrasah (*school ownership*),
- g) Tercapainya standar nasional pendidikan secara otentik dan obyektif,
- h) Terwujudnya madrasah yang berorientasi pada standar international.<sup>42</sup>

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Merujuk kepada Buku Pedoman Pedoman Pengelolaan Pendidikan Kependudukan Melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP, SMA dan Sederajat<sup>43</sup> serta Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penerapan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal<sup>44</sup> yang diterbitkan oleh BKKBN Jakarta, bahwa prinsip-prinsip dasar SSK adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Siaga Kependudukan, mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan sehingga

---

<sup>42</sup> Dokumen MAN Model Bojonegoro.

<sup>43</sup> BKKBN, *Pedoman Pengelolaan Pendidikan Kependudukan Melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Di SMP, SMA Dan Sederajat* (Jakarta: Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN, 2017); BKKBN, *Pedoman Pengelolaan Pendidikan Kependudukan Melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Di SMP, SMA Dan Sederajat*, 2017..

<sup>44</sup> BKKBN, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Penerapan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal* (Jakarta, 2018),

<https://cis.bkkbn.go.id/dalduk/?wpdmpro=petunjuk-teknis-pengelolaan-dan-penerapan-pendidikan-kependudukan-jalur-formal-2018&wpdmdl=1313>.

bukan merupakan mata pelajaran baru. Sehingga tidak akan menambah jam pelajaran dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Namun dengan adanya pengintegrasian materi pendidikan kependudukan ini diharapkan akan mempertajam materi yang dibahas, atau melalui mata pelajaran muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sekolah Siaga Kependudukan, merupakan wadah bagi program-program yang telah digulirkan BKKBN sebelumnya seperti PIK Remaja dan *Genre Goes To School* sehingga dapat berjalan berdampingan dan simultan.
3. Sekolah Siaga Kependudukan, merupakan program berbasis kurikulum nasional sehingga tidak akan ada perbedaan karakteristik wilayah baik secara geografis maupun administratif.
4. Sekolah Siaga Kependudukan, bersifat gradual meliputi beberapa bidang studi sesuai dengan pokok bahasan pada mata pelajaran, sehingga akan terus menerus mengalami pengembangan.
5. Sekolah Siaga Kependudukan, konsisten dilaksanakan selama mata pelajaran tersebut dan pokok bahasan yang berhubungan dengan kependudukan tetap ada dalam kurikulum.
6. Sekolah Siaga Kependudukan, mengedepankan peran aktif peserta didik untuk mengamati, mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta mengkomunikasikan data kependudukan di tempat tinggal mereka sendiri. Sehingga diharapkan nantinya akan muncul kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab peserta didik terhadap kondisi kependudukan di daerah tempat tinggalnya masing-masing.

Berdasarkan prinsip utama di atas, maka pelaksanaan SSK di Aceh sudah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar di atas.

Hanya saja memang berdasarkan temuan-temuan di lapangan, masih banyak yang harus dibenahi dan disempurnakan lagi. Untuk menganalisis hasil-hasil temuan lapangan, maka di bagian ini akan diuraikan beberapa analisis terhadap proses pelaksanaan SSK, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SSK dan integrasi materi SSK ke dalam Pendidikan Agama Islam.

## **1. Proses Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan**

Proses pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Aceh dapat dianalisis melalui tahapan proses dalam manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengontrolan (*controlling*). Temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan SSK di 2 (dua) sekolah yang ditunjukkan sebagai *pilot project* SSK berbeda-beda dari aspek ketercapaian program dan sangat tergantung kepada pemahaman pihak sekolah terhadap program SSK, sarana/prasarana, dan Sumber Daya Manusia di masing-masing sekolah. Sekolah-sekolah dimaksud adalah SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh dan MAN Model Bojonegoro.

### **1. Perencanaan**

Dalam konteks SMA Negeri 10 Fajar Harapan, perencanaan program SSK dilakukan oleh BKKBN Perwakilan



Aceh mulai dari tujuan pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, petunjuk teknis program, hingga sosialisasi program kepada sekolah. Artinya BKKBN Provinsi Aceh yang langsung turun tangan melakukannya. Kemudian selanjutnya pihak sekolah SMA Negeri 10 Fajar Harapan yang melakukan langkah-langkah tindak lanjutnya. Kondisi ini hampir sama dengan yang terjadi di MAN Model Bojonegoro, Jawa Timur. Meskipun bukan BKKBN Provinsi yang melakukannya secara langsung, akan tetapi BKKBN Bojonegoro yang aktif melakukannya. Melalui arahan dari BKKBN Kabupaten Bojonegoro ini, kemudian pihak MAN Model Bojonegoro menindaklanjutinya dengan menyusun program-program terkait. Dalam hal ini kreativitas internal sekolah masing-masing menduduki posisi yang sangat signifikan.

## 2. Pengorganisasian

Dalam konteks SSK di Aceh maupun Jawa Timur, BKKBN mengundang perwakilan sekolah tersebut untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi program. Fokus utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap program kependudukan dan SSK. Peserta pelatihan dan sosialisasi ini sekaligus menjadi duta BKKBN di sekolahnya masing-masing untuk menjalankan program SSK ini.

Dalam konteks Aceh, untuk menguatkan pemahaman guru terhadap program SSK, pelatihan dan sosialisasi ditutup dengan mengunjungi SMA Negeri 10 Fajar Harapan yang telah terlebih dahulu menjadi *pilot project* BKKBN dalam program SSK di Banda Aceh.

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara di sekolah SMA Negeri 10 Fajar Harapan, peneliti melihat bahwa peserta pelatihan yang diutus oleh pihak sekolah tidak hanya guru mata pelajaran, tetapi juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum, staf perpustakaan dan kepala perpustakaan. Hasil wawancara dan FGD menunjukkan bahwa peserta pelatihan SSK tersebut belum sepenuhnya memahami program SSK secara detil, khususnya dalam proses pengintegrasian materi-materi kependudukan ke dalam berbagai mata pelajaran. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan yang telah dilaksanakan pada dasarnya masih belum memenuhi harapan dan masih perlu disempurnakan. Semestinya pelatihan yang diadakan oleh BKKBN juga mengakomodir secara khusus terkait dengan teknis dan praktis strategi pengintegrasian materi-materi kependudukan ke dalam mata pelajaran.

### 3. Pelaksanaan

Menurut hasil temuan di lapangan, pelaksanaan program SSK di kedua sekolah sudah berjalan relatif baik

meskipun sebenarnya juga masih memiliki beberapa kekurangan dan permasalahan. Faktor yang bisa jadi berpengaruh besar adalah karena unsur-unsur guru maupun komite sekolah SMA Negeri 10 Fajar dan MAN Model Bojonegoro mendukung penuh proram SSK ini. Mereka juga sangat terbuka dengan program-program yang dicanangkan oleh pihak eksternal, selama program tersebut juga memberikan efek positif bagi pengembangan kualitas dan citra sekolah.

Pelaksanaan program SSK di SMA Negeri 10 Fajar Harapan telah sampai pada proses integrasi materi SSK di dalam kurikulum mata pelajaran. Bahkan materi kependudukan juga telah dimasukkan hingga ke silabus mata pelajaran tepatnya pada Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran. Di SMA Negeri 10 Fajar Harapan materi SSK tidak dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran, hanya beberapa mata pelajaran yang dapat disesuaikan materinya dan diintegrasikan dengan materi SSK. Beberapa mata pelajaran yang dapat diintegrasikan materi SSK di SMA Negeri 10 Fajar Harapan antara lain: Sejarah, PPkN, Biologi dan Ekonomi. Adapun bidang Pendidikan Agama Islam, belum mengakomodirnya.

Berbeda dengan kondisi di atas, pelaksanaan program SSK di MAN Model Bojonegoro kelihatannya hanya

memfokuskan pada aspek aktivitas di luar proses pembelajaran, artinya belum sampai kepada pengintegrasian materi SSK dalam kurikulum yang diacu atau mata pelajaran. Hasil FGD dan wawancara menunjukkan bahwa proses integrasi SSK masih baru direncanakan. Keadaan saat ini program SSK belum dimasukkan ke dalam materi mata pelajaran, tetapi tersampaikan secara tidak disengaja saat dalam materi yang berhubungan dengan materi kependudukan. Dengan kata lain pengintegrasian materi kependudukan masih belum dijalankan secara struktur dan sistematis.

#### 4. Evaluasi

Evaluasi program SSK yang telah dilakukan selama ini oleh BKKBN Perwakilan Aceh maupun BKKBN Bojonegoro. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD bahwa sejak bergulirnya program SSK telah dilakukan beberapa kali monitoring dan evaluasi (Monev) program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) oleh BKKBN Aceh ke sekolah-sekolah tersebut. Monev tersebut bertujuan untuk melihat progress berjalannya program dan masalah-masalah yang dihadapinya. Akan tetapi menurut pengakuan pihak sekolah, Monev yang dilakukan belum mampu menyelesaikan kendala pelaksanaan program SSK di sekolah-sekolah tersebut. Bisa jadi hal ini

dikarenakan hasil pemetaan permasalahan dari Monev yang sudah dilaksanakan, belum ditindaklanjuti secara sistematis oleh BKKBN sendiri. Tentu hal ini menjadi sebuah catatan penting untuk BKKBN Perwakilan Aceh sebagai pihak yang mencanangkan program SSK ke sekolah-sekolah di Aceh maupun Jawa Timur.

## **2. Kendala yang Dihadapi Sekolah**

Dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh sekolah-sekolah pelaksana yang diteliti yaitu SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh dan MAN Model Bojonegoro.

Di antara kendala-kendala tersebut adalah *pertama*, terkait Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Dalam sebuah program tentunya perlu pemantapan dari awal terkait rencana pelaksanaan sebuah program, agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan atau tujuan diadakannya program tersebut. Ketidaktersediaan sebuah petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan akan menciptakan kebingungan bagi pelaksana program, apalagi jika ditemukan masalah-masalah di lapangan yang dapat memiliki tafsiran bermacam-macam. Selain untuk keberlangsungan program, Juknis dan Juklak juga diperlukan untuk penyeragaman,

sehingga akan memudahkan dalam melakukan evaluasi program.

Sebenarnya pedoman pembentukan SSK sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis SSK sudah diberikan oleh BKKBN Pusat (Jakarta) dan dapat diunduh secara daring (*online*) melalui tautan: <https://cis.bkkbn.go.id/dalduku/?p=20>. Info tentang tautan ini juga sudah disampaikan oleh pihak BKKBN ke sekolah-sekolah pelaksana SSK. Hanya saja persoalannya adalah bisa jadi sekolah pelaksana SSK tidak mengunduhnya, atau mengunduhnya akan tetapi tidak mempelajari isinya dengan baik. Hal ini akhirnya mengakibatkan pihak sekolah merasa kebingungan dalam menindaklanjuti program SSK.

Dari penelusuran peneliti, tautan (<https://cis.bkkbn.go.id/dalduku/?p=20>) berisi berbagai macam dokumen dan referensi baik terkait pendidikan kependudukan secara umum maupun SSK secara khusus. Di dalam tautan tersebut terdapat 10 *folder* meliputi: Artikel Pendidikan Kependudukan, Dokumen Perjanjian, Galeri, Info Grafis, Lain-Lain, Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal, Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Informal, Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Non Formal, Pedoman Pendidikan Kependudukan dan Surat Edaran/ Himbauan/ Perintah. Pada setiap *folder* terdapat

dokumen-dokumen yang bisa diunduh secara gratis (termasuk juga contoh-contoh RPP). Hanya saja memang dibutuhkan koneksi internet yang memadai untuk bisa mengunduh semuanya secara sempurna. Selain itu, ada juga folder yang tidak bisa dibuka yaitu folder “Materi Integrasi dalam Mata Pelajaran (Silabus)” di semua jenjang: perguruan tinggi, SD-MI, SLTA-MA-SMK dan SLTP-MTs. Hal ini menjadi catatan bagi BKKBN Pusat untuk memperbaikinya.

*Kedua*, keterbatasan dana dan fasilitas. Ada dua hal utama yang kiranya sangat memerlukan dukungan dana untuk pengembangan SSK ini, yaitu pengadaan fasilitas pendukung. Beberapa fasilitas yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan SSK ini adalah seperti pengadaan rak buku, lemari serta dekorasinya, pengadaan buku terkait SSK, kemudian juga pengadaan alat tulis kantor (ATK) untuk mendukung proses pelaksanaan SSK.

Pengadaan fasilitas rak buku adalah untuk efektifitas pojok kependudukan sebagai salah satu bagian program SSK. Keterbatasan buku terkait SSK juga akan terkendala, karena buku-buku cetak yang telah diberikan pada saat pertama *launching* program SSK masih dalam jumlah sedikit serta memerlukan penambahan dan pengembangan, terutama jumlah dan juga model buku yang diadakan, seperti harus juga mengakomodir komik dan novel agar siswa lebih tertarik

untuk membaca dan akan menambah informasi terkait SSK, tidak hanya buku dari terbitan BKKBN, akan tetapi dapat juga buku-buku lain yang terkait dengan kependudukan. Adapun pengadaan pendukung oprasional seperti pengadaan kertas dan lainnya juga diperlukan, karena setiap sekolah memiliki anggaran dana yang terbatas. Kalaupun masing-masing sekolah memiliki sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), akan tetapi tidak memungkinkan untuk mensubsidi pelaksanaan operasional program SSK.

Selanjutnya, masih terkait dengan dukungan dana, yang tidak kalah penting dan sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah pelaksana SSK adalah terkait dengan pengadaan biaya operasional kegiatan, karena beberapa kegiatan yang perlu dilakukan terkait SSK akan memerlukan biaya, minimal untuk biaya konsumsi dan akomodasi pelaksana, terutama guru dan kepala sekolah yang secara langsung membimbing pelaksanaan program SSK ini. Dalam proses pengintegrasian kurikulum misalnya, guru setiap pelajaran sudah barang tentu harus duduk bersama kelompok guru untuk mendiskusikan strategi dan teknis pengintegrasian materi-materi kependudukan ke dalam berbagai mata pelajaran. Kegiatan ini tentu memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, jika program ini diikuti dengan pendanaan yang baik, maka akan



sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program SSK di sekolah-sekolah pelaksana.

*Ketiga*, sosialisasi tentang SSK masih minim. Masih kurangnya sosialisasi tentang program SSK kepada unsur-unsur sekolah (guru, komite sekolah dan siswa) merupakan salah satu kendala serius. Dari temuan data lapangan, peneliti masih menemukan beberapa unsur sekolah baik dari kalangan guru, komite sekolah maupun siswa yang belum memahami program SSK dengan baik. Di kalangan guru, selain ditemukan banyak yang kebingungan dengan cara pengintegrasian materi-materi kependudukan dalam mata pelajaran, juga masih ada dari mereka dan siswa yang tidak mengetahui SSK. Beberapa guru yang mengetahui SSK adalah yang pernah mengikuti pelatihan SSK yang diadakan oleh BKKBN Perwakilan Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa guru yang diutus sebagai peserta pelatihan belum melaksanakan sosialisasi program SSK dengan baik pasca pelatihan yang diikuti.

*Keempat*; belum adanya evaluasi secara tersistem dan terstruktur terkait program SSK. Dalam setiap program, adanya evaluasi adalah sebuah kewajiban, karena akan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan terhadap program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi akan memberikan pemetaan beragam permasalahan yang dihadapi program dan tingkat kemajuannya. Untuk itu evaluasi harus dilakukan secara

terukur dan sistematis untuk mencapai hasil yang maksimal. Evaluasi terhadap program SSK dapat melibatkan evaluator internal ataupun evaluator eksternal. Namun, untuk hasil yang lebih baik dan objektif, akan lebih baik jika mengikutsertakan evaluator eksternal. Setiap evaluasi harus memiliki kriteria ketercapaian, yang menjadi kriteria ketercapaian dalam program SSK adalah yang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan SSK. Dengan adanya evaluasi ini, maka akan semakin meningkatkan kualitas dari program, terutama dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi serta akan dapat merumuskan pengembangan program yang lebih baik ke depan.

Pengukuran Indikator Keberhasilan Penerapan SSK sebagaimana yang tercantum dalam petunjuk teknis pengelolaan dan penerapan pendidikan kependudukan jalur formal<sup>45</sup> adalah sebagai berikut:

1. *Input* (Masukan)
  - a. Teridentifikasi sekolah-sekolah rintisan yang representatif baik dari segi kompetensi guru, dukungan kepala sekolah, dukungan komite sekolah, maupun dukungan sarana lain.
  - b. Ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk pelaksanaan Program Kependudukan,

---

<sup>45</sup>BKKBN.

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tidak hanya berasal dari APBD dan APBN, dapat pula dukungan yang berasal dari sumber lain.

- c. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.
2. Proses (Kegiatan)
- a. Penyampaian materi dan pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja peserta didik.
  - b. Terlaksananya kunjungan peserta didik ke kantor/ dinas/instansi terkait dalam rangka mencari informasi kependudukan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar.
  - c. Pengolahan data kependudukan berbasis IT yang dilakukan para peserta didik dalam mengolah data yang diperoleh.
  - d. Meningkatnya keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan analisis data-data kependudukan.
  - e. Meningkatnya kemampuan peserta didik dalam melakukan analisis terhadap masalah-masalah kependudukan.

- f. Meningkatnya pemahaman peserta didik mengenai masalah-masalah kependudukan yang ditunjukkan dengan hasil kuisioner terhadap pernikahan di usia muda dan kesadaran kesehatan reproduksi.

### 3. *Output* (Keluaran)

- a. Pemahaman tentang kependudukan, baik kuantitas, kualitas persebaran yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, pentingnya kesehatan reproduksi dan pembentukan keluarga yang berkualitas.
- b. Diharapkan dapat meminimalisir perkawinan usia anak

Jika melihat kepada indicator-indikator di atas, maka pelaksanaan SSK masih memerlukan banyak penyempurnaan-penyempurnaan.

*Kelima*, penguatan dan pengembangan kerjasama lintas instansi/ institusi dan lintas program. Untuk mensukseskan program SSK, tentu saja BKKBN tidak bisa berjalan sendiri. BKKBN Perwakilan Aceh perlu memperkuat lagi koordinasi dan kerjasama lintas instansi/ institusi dengan lembaga-lembaga terkait lainnya khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Hal ini mutlak diperlukan dikarenakan sekolah-sekolah pada dasarnya berada di bawah naungan kedua lembaga ini. Hal ini juga

sangat memungkinkan mengingat sudah ada nota kesepahaman sebelumnya yang dijalin.

Dalam konteks Aceh, selain dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, BKKBN juga perlu mempererat jalinan kerjasama dengan Majelis Adat Aceh (MAA) dan perguruan tinggi di Aceh yang sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) seperti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala.

Jalinan kerjasama dan koordinasi dengan MAA di atas penting khususnya terkait dengan pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal ke dalam program SSK sehingga bisa lebih diterima oleh guru dan siswa. Adapun kerjasama dengan perguruan tinggi (khususnya yang memiliki program keguruan dan sudah menandatangani nota kesepahaman) akan sangat bermanfaat untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan guru di sekolah pelaksana SSK dalam mengintegrasikan materi-materi kependudukan ke dalam berbagai mata pelajaran.

Lebih lanjut lagi, program SSK sudah semestinya juga disinergikan dengan program-program internal BKKBN di sekolah dan program-program sejalan lainnya yang dilaksanakan oleh instansi di luar BKKBN dan menjadikan sekolah juga sebagai pelaksana program.

Terkait hal di atas, sebagai sebuah catatan penting, secara konseptual SSK bukan merupakan program khusus kependudukan, melainkan bersinergi dengan program KKBPK lainnya. Dapat dikatakan bahwa SSK merupakan wadah bagi sosialisasi program KKBPK, khususnya program dengan sasaran generasi muda, yang dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang ada dalam kurikulum. Beberapa program lain yang dicanangkan oleh BKKBN dan dapat disinergikan ke dalam SSK adalah: GENRE, PIK KRR, Kespro dan Kespro Remaja, Advokasi KIE Program KKBPK, dsb.

Adapun program-program lintas instansi yang bisa disinergikan dengan SSK adalah:

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Proses Belajar Mengajar, kegiatan Ektrakurikuler, dsb
- b. Badan Narkotika Nasional: Sosialisasi anti NAPZA
- c. Kementerian Lingkungan Hidup: Sekolah Adyata
- d. Kementerian Dalam Negeri: Sekolah Kebangsaan

### **3. Integrasi SSK ke dalam Pendidikan Agama Islam**

Persoalan integrasi kurikulum pada dasarnya harus dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Oleh sebab itu sangat diperlukan upaya-upaya pihak terkait untuk mensukseskan pelaksanaan SSK di Aceh dan Jawa Timur.

Dalam kurikulum terintegrasi, materi pelajaran harus disesuaikan dengan kehidupan peserta didik di luar sekolah yaitu kehidupan nyata, *“The concept of integrated curricula continues the conversation with practical ways to transform that learning into real-life experiences that transfer effortlessly into future applications”*.<sup>46</sup> Konsep ini sebenarnya menegaskan bahwa integrasi materi kependudukan ke dalam mata pelajaran sebagai tujuan utama program SSK, sudah semestinya diejawantahkan secara konkrit, termasuk dalam hal ini adalah mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Aceh maupun Jawa Timur. Khusus di Aceh, hal-hal terkait dengan syariat Islam maupun tradisi-tradisi lokal akan lebih mengena jika juga diangkat sebagai sudut pandang tersendiri di dalam materi-materi kependudukan yang dilaksanakan di SSK.

Dari beberapa teori tentang integrasi kurikulum sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa model kurikulum terintegrasi setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi meliputi: (1) Pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu; (2) Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu; dan (3) Pengintegrasian di dalam satu dan beberapa disiplin ilmu.<sup>47</sup> Dari ketiga model ini, peneliti melihat bahwa dalam Program SSK sangat mungkin dilakukan dalam bentuk

---

<sup>46</sup> Robin Fogarty, *How to Integrate the Curricula* (USA: CorwinPress, 2009), 7.

<sup>47</sup> Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 40.

model kedua yaitu mengintegrasikan materi-materi kependudukan ke dalam berbagai disiplin ilmu (mata pelajaran), di antaranya adalah dalam Pendidikan Agama Islam. Lebih dari itu, pengintegrasian materi-materi kependudukan dalam konteks SSK di Aceh juga sangat memungkinkan untuk mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dikarenakan Pemerintah Aceh (dalam hal ini Dinas Pendidikan Aceh) dewasa ini sedang menyempurnakan pelaksanaan Kurikulum Aceh.

Pengakomodiran nilai-nilai kearifan lokal dalam pelaksanaan program SSK dalam kaitannya dengan implementasi Kurikulum Aceh tentu membutuhkan koordinasi yang erat antara BKKBN dengan Dinas Pendidikan Aceh. Bahkan seperti peneliti jelaskan sebelumnya di atas, BKKBN juga sangat direkomendasikan mempererat kerjasama dengan Majelis Adat Aceh (MAA). Kerjasama dan koordinasi dengan salah satu lembaga adat di Aceh ini tentunya akan sangat berkontribusi positif untuk memperkaya isi materi SSK menurut perspektif nilai-nilai kultural dan kearifan lokal dalam proses integrasi kurikulum nantinya.

Penguatan dan pengembangan integrasi nilai-nilai kearifan lokal Aceh dalam pelaksanaan SSK memang sejauh ini tidak terlihat jelas di sekolah-sekolah pelaksana (hal ini antara lain bisa dilihat dari dokumen-dokumen RPP maupun Silabus



yang dibuat oleh guru di sekolah pelaksana SSK). Padahal agar berjalan efektif, integrasi sedemikian rupa ini sangat penting.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti jelaskan dari Bab I sampai dengan Bab IV, maka pada Bab V ini peneliti akan mengemukakan beberapa simpulan dan saran-saran sebagai rekomendasi perbaikan pelaksanaan program SSK di Aceh.

1. Proses pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 10 Fajar Harapan dan MAN Model Bojonegoro secara umum sudah berjalan dengan baik, hal ini antara lain terlihat dari respon sekolah pelaksana yang merespon positif program BKKBN ini. Meski demikian, masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Di kalangan internal sekolah yang diteliti, masih terdapat beberapa pihak (baik dari kalangan guru, pegawai, komite sekolah, maupun siswa) yang masih belum memahami dengan baik konsep, arah, tujuan dan sasaran program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
2. Beberapa kendala yang dihadapi sekolah dalam proses pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 10 Fajar Harapan dan MAN Model Bojonegoro antara lain meliputi: (a) Pemahaman tentang konsep SSK di

kalangan sekolah pelaksana program SSK masih belum maksimal; (b) Tidak ada alokasi dana khusus untuk pengembangan Pojok Baca Kependudukan sebagai bagian dari pelaksanaan program SSK; (c) Penguasaan guru dalam mengintegrasikan materi kependudukan dalam mata pelajaran termasuk dalam menghubungkannya dengan kearifan lokal masih terbatas; (d) Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan simultan dari BKKBN Perwakilan Aceh untuk mengadvokasi keberlanjutan dan penyempurnaan pelaksanaan SSK di Aceh dan; (e) Masih lemahnya koordinasi lintas institusi.

3. Integrasi materi kependudukan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) belum berjalan maksimal baik di SMA Negeri 10 Fajar Harapan maupun MAN Model Bojonegoro. Meskipun sudah ada upaya mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam beberapa mata pelajaran di SMA Negeri 10 Fajar Harapan, tapi untuk bidang Pendidikan Agama Islam belum diimplementasikan. Padahal pengintegrasian ini sangat penting khususnya berbasis kearifan lokal masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai Islam. Secara umum strategi integrasi materi kependudukan dalam mata pelajaran tertentu sebagaimana dirancang oleh BKKBN sudah tepat. Hal ini tentu dengan pertimbangan untuk

tidak menambah beban belajar siswa. Lebih dari itu, seiring dengan pelaksanaan kurikulum Aceh, maka nilai-nilai kearifan lokal di Aceh juga perlu sekali diakomodir. Akan tetapi sayangnya hal ini belum banyak disentuh oleh sekolah-sekolah yang melaksanakan program SSK.

## **B. Saran-saran**

### **1. Memperkuat Koordinasi Lintas Institusi.**

Untuk mensukseskan pelaksanaan program SSK, maka BKKBN Perwakilan Aceh dan Perwakilan Jawa Timur perlu mempererat koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/ Kota tempat SSK dilaksanakan. Koordinasi lintas instansi seperti ini sangat penting dilakukan mengingat program SSK tidak akan dapat berjalan sukses jika dilaksanakan oleh BKKBN dan sekolah. Hal ini juga sangat memungkinkan, mengingat dasar Nota Kesepahaman antara BKKBN Pusat dan Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri sudah pernah dibuat sebelumnya, sehingga bisa menjadi dasar untuk ditindaklanjuti di lapangan. Persoalan-persoalan terkait anggaran biaya dan fasilitas yang diperlukan Pojok Baca Kependudukan maupun hal terkait lain bukan tidak mungkin

akan terselesaikan, jika koordinasi yang erat terjalin antarinstansi ini.

## 2. Memperkuat Kapasitas Guru.

Penguatan kapasitas guru untuk mengintegrasikan materi kependudukan dalam mata pelajaran terkait di sekolah/madrasah masih perlu diperkuat. Sejumlah pelatihan seharusnya lebih banyak mengakomodir guru-guru mata pelajaran terkait. Pelatihan yang diadakan semestinya juga dilakukan untuk mencetak para tenaga pelatih (*Training of Trainer*), sehingga nantinya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya terkait SSK di sekolah-sekolah lain di Aceh dan Jawa Timur melalui kelompok-kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adebowale, Stephen A, and Martin E Palamuleni.  
“Determinants of Unmet Need for Modern Contraception and Reasons for Non-Use among Married Women in Rural Areas of Burkina Faso.” *African Population Studies* 28, no. 1 (2014).
- Artono, I Made Pasek. “Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus Fenomena Pernikahan Dini Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Antropologi Kesehatan).” *Humanis* 15, no. 2 (2016): 48–54.
- “Berita: BKKBN KEMBANGKAN MODEL SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK) DI 108 SEKOLAH SE-JAWA BARAT.” Accessed April 7, 2018.  
[http://jabar.bkkbn.go.id/\\_layouts/mobile/dispform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=1776](http://jabar.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=1776).
- BKKBN. *Pedoman Pengelolaan Pendidikan Kependudukan Melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Di SMP, SMA Dan Sederajat*. Jakarta: Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN, 2017.
- — — . *Pedoman Pengelolaan Pendidikan Kependudukan Melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Di SMP, SMA Dan Sederajat*, 2017.
- — — . *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Penerapan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal*. Jakarta, 2018.  
<https://cis.bkkbn.go.id/dalduk/?wpdmpro=petunjuk-teknis-pengelolaan-dan-penerapan-pendidikan-kependudukan-jalur-formal-2018&wpdmdl=1313>.
- “BKKBN Jalankan Sekolah Siaga Kependudukan,” 2018.  
<https://jateng.antaranews.com/detail/bkkbn-jalankan-sekolah-siaga-kependudukan.html>.
- Davies, C.T. “Population Education.” *Lifelong Education for Adults* 20 (1989): 131–33. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-030851-7.50044-8>.

- Debebe, Defaru. "Population Education , Fertility and Family Planning in Ethiopia." *International Journal of Pharmaceutical and Medical Research* 2, no. 4 (2014): 4-13.
- "Disdalduk KB Pekanbaru Launching Program Sekolah Siaga Kependudukan." Accessed April 15, 2018.  
<http://m.halloraiu.com/read-100657-2018-03-06-disdalduk-kb-pekanbaru-launching-program-sekolah-siaga-kependudukan.html#sthash.E1kOd0d2.dpbs>.
- Ghimire, Dirgha J, and William G Axinn. "Marital Processes, Arranged Marriage, and Contraception to Limit Fertility," 2013. <https://doi.org/10.1007/s13524-013-0221-5>.
- "Kabupaten Rejang Lebong Terapkan Sekolah Siaga Kependudukan." Accessed April 15, 2018.  
<http://infopublik.id/read/214953/kabupaten-rejang-lebong-sudah-terapkan-sekolah-siaga-kependudukan>.
- Kurniawati, Herlin Fitriani, and Zahroh Shaluhiah. "Pengetahuan Pendidik Sebaya Mempengaruhi Pemberian Informasi KRR Di Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 9, no. 2 (2014): 162-72.
- Laporan Kinerja BKKBN Tahun 2015*. Accessed March 26, 2017.  
[https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/LAKIP\\_BKKBN\\_2016\\_1.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/LAKIP_BKKBN_2016_1.pdf).
- Lutz, Wolfgang. "Population, Education and the Sustainable Development Goals," 2016.
- Mahmood, Naushin. "The Demographic Dividend: Effects of Population Change on School Education in Pakistan." *PIDE-Working Papers*, 2011.  
<http://ideas.repec.org/p/pid/wpaper/201168.html>.
- Majumder, Nabanita, and Faujdar Ram. "Explaining the Role of Proximate Determinants on Fertility Decline among Poor and Non-Poor in Asian Countries," n.d.  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115441>.
- "MAN 1 Bojonegoro, Sekolah Siaga Kependudukan." Accessed September 30, 2018.  
<http://blokbojonegoro.com/2018/07/25/man-1-bojonegoro-sekolah-siaga-kependudukan/>.

- “MAN Model Bojonegoro Gelar Sastra Pelataran.” Accessed April 15, 2018.  
<https://www.jawapos.com/radarbojonegoro/read/2018/02/16/49679/man-model-bojonegoro-gelar-sastra-pelataran>.
- Masfiah, Siti, Zahroh Shaluhiyah, and Antono Suryoputro. “Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) Dalam Kurikulum SMA Dan Pengetahuan & Sikap Kesehatan Reproduksi Siswa.” *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 8, no. 1 (2013): 69–78.  
[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=476107&val=1285&title=Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja \(PKRR\) Dalam Kurikulum SMA Dan Pengetahuan & Sikap Kesehatan Reproduksi Siswa](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=476107&val=1285&title=Pendidikan%20Kesehatan%20Reproduksi%20Remaja%20(PKRR)%20Dalam%20Kurikulum%20SMA%20Dan%20Pengetahuan%20&20Sikap%20Kesehatan%20Reproduksi%20Siswa).
- Mayasari, Fridya, and M. Noor Rochman Hadjam. “Perilaku Seksual Remaja Dalam Berpacaran Ditinjau Dari Harga Diri Berdasarkan Jenis Kelamin.” *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2000): 120–27.  
[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=260597&val=7039&title=PERILAKU SEKSUAL REMAJA DALAM BERPACARAN DITINJAU DARI HARGA DIRI BERDASARKAN JENIS KELAMIN](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=260597&val=7039&title=PERILAKU%20SEKSUAL%20REMAJA%20DALAM%20BERPACARAN%20DITINJAU%20DARI%20HARGA%20DIRI%20BERDASARKAN%20JENIS%20KELAMIN).
- Migiana, Fisabella Dea, and Dinie Ratri Desiningrum. “Seks Pranikah Bagi Remaja: Studi Fenomenologis Pada Remaja Yang Melakukan Hubungan Seksual Pranikah.” *Jurnal Empati* 4, no. 1 (2015): 88–93.  
[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=463318&val=4725&title=SEKS PRANIKAH BAGI REMAJA: Studi Fenomenologis pada Remaja yang Melakukan Hubungan Seksual Pranikah](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=463318&val=4725&title=SEKS%20PRANIKAH%20BAGI%20REMAJA:%20Studi%20Fenomenologis%20pada%20Remaja%20yang%20Melakukan%20Hubungan%20Seksual%20Pranikah).
- Minkler, Donald H, Carol Korenbrot, Claire Brindis, and San Francisco. “Health Care Delivery Family Planning Among Southeast Asian Refugees,” n.d.
- Nofridayati, Sesi. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado.” *Jikmu* 5, no. 2 (2015): 270–80.



- Osemwengie, E, and E Margaret. "Population Education in Nigeria: Purpose, Content and Problems," n.d.
- Putro, Gurendro. "Alternatif Pengembangan Model Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2009." *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 1 (2010): 23-31.
- Rahyani, Komang Yuni, Adi Utarini, Siswanto Agus Wilopo, and Mohammad Hakimi. "Perilaku Seks Pranikah Remaja." *Kesmas: National Public Health Journal* 7, no. 4 (2017): 180. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v7i4.53>.
- Seftriyana, Elisa, Adelina Hasyim, and Yunisca Nurmalisa. "IMPLEMENTASI UU PERKAWINAN TENTANG PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA PRINGOMBO TAHUN 2015." *Jurnal Kultur Demokrasi* 3, no. 1 (2015). <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/7567>.
- "Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Diresmikan - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial Kabupaten Belitung." Accessed April 15, 2018. <https://dpppas.belitungkab.go.id/v1/sekolah-siaga-kependudukan-ssk-diresmikan/>.
- Sinaga, Sarma Eko Natalia. "Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Pada Mahasiswa Akademi Kesehatan x Di Kabupaten Lebak." *Archive of Community Health* 2, no. 1 (2013): 50-55.
- Sitorus, Muhammad Ancha. "Integrasi Pendidikan Kependudukan Kedalam Kurikulum Dalam Rangka Pencapaian Target Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 1*, no. 1 (2017): 20-24. <http://semnastafis.unimed.ac.id>.
- "SMAN-8 Samarinda Model Sekolah Siaga Kependudukan." Accessed April 15, 2018. <http://www.ipkbkaltim.com/bkkbn-kaltim-launching-sekolah-siaga-kependudukan.html>.
- "SMAN 1 Tapaktuan Jadi Sekolah Siaga Kependudukan." Accessed April 7, 2018.

- <http://aceh.tribunnews.com/2018/01/13/sman-1-tapaktuan-jadi-sekolah-siaga-kependudukan>.
- "SMAN 1 Tapaktuan Jadi Sekolah Siaga Kependudukan - Serambi Indonesia," 2018.
- <http://aceh.tribunnews.com/2018/01/13/sman-1-tapaktuan-jadi-sekolah-siaga-kependudukan>.
- Sumbulah, Umi. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)." *Egalita Jurnal Kesehatan Dan Keadilan Gender* VII (2012): hlm. 83-101.
- "TP PKK Banjarbaru Resmikan Pojok Kependudukan Di Sekolah." Accessed April 15, 2018.
- <http://kalsel.prokal.co/read/news/13029-tp-pkk-banjarbaru-resmikan-pojok-kependudukan-di-sekolah.html>.
- Trisnawati, Yuli, Tri Anasari, and Artathi Eka S. "Perilaku Seksual Remaja SMA Di Purwokerto Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya." *Bidan Prada: Jurnal Publikasi Kebidanan Akbid YLPP Purwokerto* 1, no. 01 (2010): 1-15.
- <http://ojs.akbidylpp.ac.id/index.php/Prada/article/view/36/34>.
- Umaroh, ayu khoiril. "Hubungan Antara Faktor Internal Dan Eksternal Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja Indonesia." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 10 (2015): 65-75.
- UNESCO. *Population Education: A Contemporary Concern*. Paris: Unesco, 1978.
- United Nations. *Population, Education and Development*. New York. New York: United Nations, 2003. <https://doi.org/92-1-151382-0>.
- Widyanto, Anton, NF Marzuki, Mumtazul Fikri, and Eddy Munawar. "Keluarga Berencana Dalam Perspektif Sosio-Kultural Masyarakat Syariat (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Aceh Terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi)." *Jurnal Keluarga Berencana* 2, no. 1 (February 14, 2018): 22-33.
- <http://jurnalkb.org/ojskb2481/index.php/kb/article/vie>

w/10.

- World Health Organization. "Family Life, Reproductive Health, and Population Education: Key Elements of a Health-Promoting School." *WHO Information Series on School Health*, no. Document Eight (2003).
- Wulan, Tyas Retno, and Muslihudin Muslihudin. "Perilaku Seksual Remaja Di Pedesaan (Studi Tentang Perilaku Seks Dan Reproduksi Sehat Remaja Di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)." *Jurnal Pembangunan Pedesaan* 3, no. 2 (2003): 81-90.  
<http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Pembangunan/article/viewFile/52/51>.
- Yount, Kathryn M, Sarah Zureick-Brown, Nafisa Halim, Kayla Lavilla, K M Yount, S Zureick-Brown, K Lavilla, and N Halim. "Fertility Decline, Girls' Well-Being, and Gender Gaps in Children's Well-Being in Poor Countries." *Demography* 51 (2014): 535-61.  
<https://doi.org/10.1007/s13524-014-0282-0>.
- Žiga, Č, and Štefan Bojnec. "Population, Education and Socio-Economic DEvelopment in Slovenia." In *Managing the Process of Globalisation in New and Upcoming EU Members*, 24-26. Bernardlin, Slovenia, 2005. <http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6573-03-9/cepar.pdf>.

## Lampiran 1

### Instrumen Penelitian

No	Rumusan Masalah	Indikator	Butir Pertanyaan
1	Bagaimana <b>proses pelaksanaan program</b> Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Aceh dan Jawa Timur?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Program</li> <li>2. Pengorganisasian</li> <li>3. Implementasi Program</li> <li>4. evaluasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Bagaimana perencanaan program SSK?</li> <li>1.2. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan program SSK ini?</li> <li>1.3. Apa landasan regulasi program SSK ini?</li> <li>1.4. Apakah ada juknis/juklak untuk program SSK ini?</li> <li>1.5. Untuk berapa lama program SSK ini direncanakan?</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Bagaimana bentuk kerjasama bkkbn dan sekolah ini dalam program SSK?</li> <li>2.2 Bagaimana peran dan tanggungjawab bkkbn dalam program SSK ini?</li> <li>2.3 Bagaimana peran dan tanggungjawab pihak sekolah (<i>kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan siswa</i>) dalam program SSK ini?</li> <li>2.4 Adakah pihak lain yang terlibat dalam program SSK ini?</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 kapan program SSK ini mulai dilaksanakan di Sekolah?</li> <li>3.2 Dalam bentuk apasaja program SSK</li> </ol>

			<p>ini dilaksanakan?</p> <p>3.3 Apakah program SSK ini dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah?</p> <p>3.4 Adakah penyesuaian sarana dan prasarana terkait pelaksanaan program SSK?</p> <p>3.5 Bagaimana metode pembelajaran terkait program SSK?</p>
			<p>4.1 bagaimana bentuk evaluasi program SSK ini?</p> <p>4.2 Kapan evaluasi dilakukan?</p> <p>4.3 Siapa saja yang melakukan evaluasi ini?</p> <p>4.4 Apakah bkkbn dilibatkan dalam evaluasi?</p> <p>4.5 Adakah evaluasi ini berpengaruh terhadap keberlanjutan program SSK?</p>
2	<p>Apa saja <b>kendala yang dihadapi sekolah</b> dalam proses pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan di Aceh dan Jawa Timur?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor guru, kepala sekolah dan siswa</li> <li>2. Saranan dan prasarana</li> <li>3. Masyarakat dan orang tua</li> </ol>	<p>1.1 bagaimana dukungan <b>kepala sekolah/guru/siswa</b> terhadap pelaksanaan SSK?</p> <p>1.2 Bagaimana tingkat pemahaman <b>kepala sekolah/guru/siswa</b> tentang program SSK?</p> <p>1.3 Apasaja masalah yang dihadapi <b>kepala sekolah/guru/siswa</b> selama pelaksanaan program SSK?</p>
			<p>2.1 Bagaimana dukungan</p>

			<p>sarana dan prasarana di sekolah dalam pelaksanaan SSK?</p> <p>2.2 Apasaja masalah yang dihadapi dalam bidang sarana dan prasarana?</p>
			<p>3.1 Bagaimana dukungan orang tua dan masyarakat terhadap pelaksanaan program SSK?</p> <p>3.2 Adakah masalah yang muncul dari orang tua dan masyarakat terkait pelaksanaan SSK?</p>
3	<p>Bagaimana <b>bentuk integrasi materi SSK dalam</b> mata pelajaran khususnya PAI yang bisa dijalankan untuk memperkuat Sekolah Siaga Kependudukan di Aceh dan Jawa Timur?</p>	<p>1. Unsur kurikulum (Tujuan, Isi, Metode, Evaluasi )</p> <p>2. PAI dan Kearifan Lokal</p>	<p>1.1 apakah <b>tujuan, Isi, metode dan evaluasi</b> yang ada dalam kurikulum program SSK sudah sesuai dengan kearifan lokal di Aceh dan Jawa Timur?</p> <p>1.2 Bagaimana bentuk pengembangan isu kependudukan dalam materi PAI yang berbasis kearifan lokal di Aceh dan Jawa Timur?</p>
			<p>2.1 Apa saja bentuk kearifan lokal Aceh (<b>forklore, seni, hikayat, ritual</b>) yang berhubungan dengan sekolah siaga kependudukan?</p> <p>2.2 Apakah bentuk-bentuk kearifan lokal ini dapat memperkuat keberadaan sekolah</p>

			siaga kependudukan di Aceh dan Jawa Timur?
--	--	--	--

## Lampiran 2

Foto Pelaksanaan SSK di MAN Model Bojonegoro, Jawa Timur



Ket: Latihan dan Cipta Karya Lagi Kependudukan



Ket: FGD tentang SSK di Sekretariat SSK MAN Model Bojonegoro

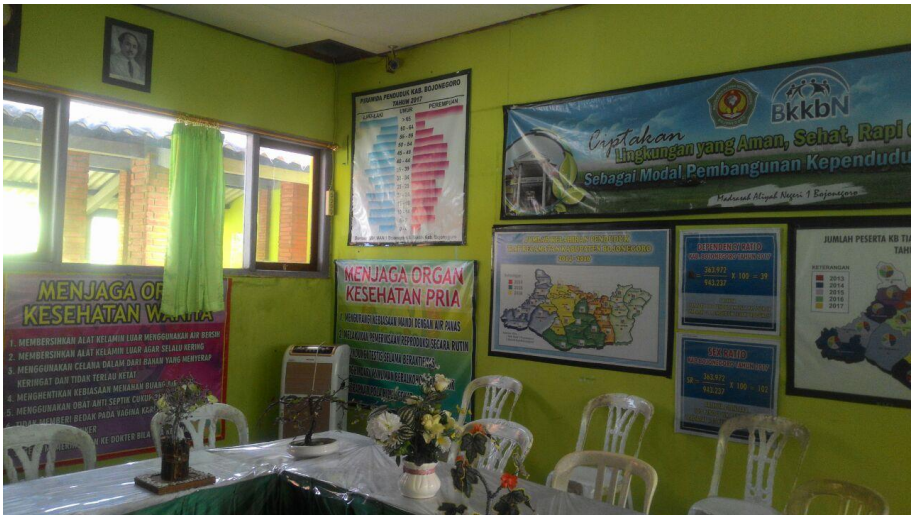




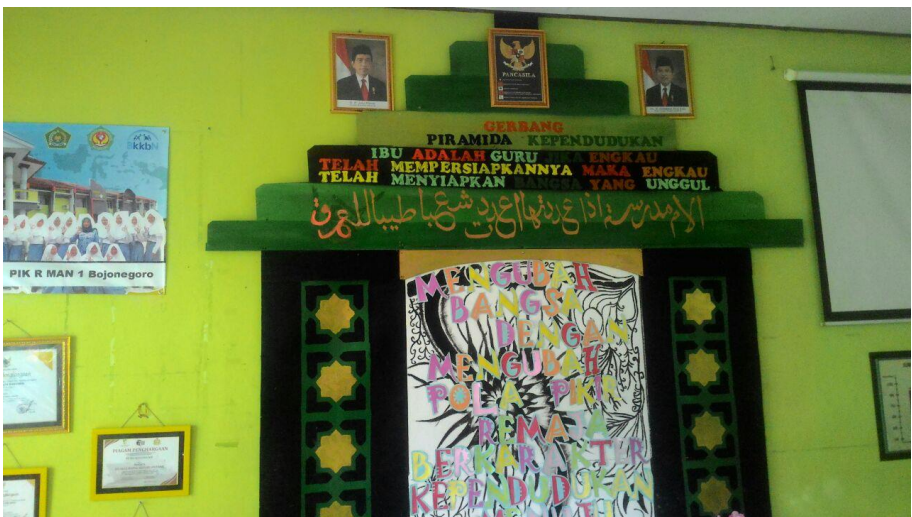
Ket: Majalah Dinding SSK MAN Model Bojonegoro



Ket: Piagam dan Piala Prestasi Siswa dalam mengikuti berbagai Lomba tentang Kependudukan di Jawa Timur



Ket: Sekretariat SSK MAN Model Bojonegoro



Ket: Sekretariat SSK MAN Model Bojonegoro

Lampiran 3

Foto Pelaksanaan SSK di SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh



Ket: Wawancara dengan pihak SMAN 10 Fajar Harapan



Ket: Beberapa buku di Pojok Kependudukan Sekolah

## Lampiran 4

### PROFIL SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH

#### 1. Sejarah Berdirinya SMAN 10 Fajar Harapan

SMAN 10 Fajar Harapan berdiri Tahun 2002 dan masih berstatus sebagai sekolah swasta, melalui surat keputusan dengan Nomor: 171/2002, yang ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 12 Agustus 2002, serta ditanda tangani oleh Walikota Banda Aceh Drs. Zulkarnain. Proses belajar mengajar perdana dimulai pada Tahun Pelajaran 2002/2003 dengan jumlah peserta didik perdana 62 orang. Tempat belajar sementara dipusatkan di Yayasan Cut Meutia Banda Aceh. Pada tanggal 15 Desember 2004 SMA Swasta Fajar Harapan ditingkatkan statusnya menjadi SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh, berdasarkan surat keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 450/280/2004, yang ditanda tangani oleh Drs. H. Syarifuddin Latif. Pada tahun 2004 SMAN 10 Fajar Harapan di pindahkan ke lokasi Gampong Ateuk Jawoe Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

SMAN 10 Fajar Harapan merupakan lembaga pendidikan yang menganut sistem *full day* dan pondokan (*Boarding*) yang dipadukan dengan sistem pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam

perkembangannya terus meningkatkan mutu pendidikan, dengan mengasah kemampuan akademik, karakter, dan skill peserta didiknya. Banyak alumni SMAN 10 Fajar Harapan melanjutkan pendidikannya di berbagai universitas terkemuka di Indonesia dan luar negeri.

## 2. Identitas Sekolah

Nama : SMAN 10 Fajar Harapan

Nomor Statistik Sekolah : 301066102010

NPSN : 10107194

Status : Negeri

Tahun berdiri : 2002

Model pengelolaan : Full Day (*Boarding School*)

Alamat:

Jl. Fajar Harapan Desa Ateuk Jawo Kec. Baiturrahman  
Kota Banda Aceh

Telepon : 0651 7409840

Kode Pos : 23245

Status tanah : Pemerintah Kota Banda Aceh

Luas Tanah : 19,200 m<sup>2</sup>

Jumlah Rombel Kelas : 15 Rombel

Jumlah Siswa : 431

Jumlah Guru : 31

Jumlah Karyawan : 8

### **3. Visi, Misi dan Tujuan SMAN Fajar Harapan**

#### **a. Visi**

Unggul dalam prestasi berlandaskan nilai Islami.

#### **b. Misi**

- 1) Membentuk generasi yang bertakwa kepada Allah Swt
- 2) Mewujudkan generasi yang cerdas berilmu pengetahuan, terampil kreatif, mandiri dan bertanggung jawab.
- 3) Membina generasi yang memiliki jiwa pegabdian pada agama, Negara, masyarakat dan keluarga dengan penuh kejujuran dan keikhlasan.
- 4) Meningkatkan prestasi kerja dengan dilandasi rasa kekeluargaan, keteladanan dan akhlakul karimah.
- 5) Melatih peserta didik dalam penggunaan berbagai multi media.
- 6) Mewujudkan kemampuan peserta didik untuk berkompetisi dalam penulisan karya tulisan ilmiah.
- 7) Melakukan pembinaan pengembangan diri dalam bidang seni, olahraga dan olimpiade.

- 8) Melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional.
- 9) Mengembangkan kegiatan gerakan literasi sekolah.

**c. Tujuan**

- 1) Menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai.
- 2) Melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, berdasarkan semangat keunggulan lokal dan global.
- 3) Meningkatkan kinerja masing-masing komponen sekolah (kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan komite sekolah) untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang inovatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing.
- 4) Meningkatkan program ekstrakurikuler dengan mewajibkan pramuka bagi seluruh warga, agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan bakat dan minat peserta didik sebagai salah satu sarana pengembangan diri siswa.

- 5) Mewujudkan peningkatan kualitas lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang seimbang serta meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
- 6) Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan segala ketentuan yang mengatur operasional warga sekolah.
- 7) Meningkatkan kualitas semua sumber daya manusia baik tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik yang dapat berkompetisi baik lokal maupun global.

#### 4. Struktur Organisasi

No	Nama	Jabatan
1	Muhibbul Khibri, M.Pd	Kepala Sekolah
2	H.M. Zaini Yusuf, S.T	Ketua komite
3	Novi Yanti	Kepala Tata usaha
4	Evi Susanti, S.Pd	Wakil Kurikulum
5	Cut Anizar, S.Pd	Wakil Kesiswaan
6	Ainun Mardhiah, S.Pd	Wakil Sarpras
7	Nizariah, S.Sos, M.Pd	Wakil Humas
8	Nellyta Aryanti, S.Pd	Kepala Perpustakaan
9	Diana Fitri, S.Si	Kepala Lab Biologi
10	Laili Suryani, S.Si	Kepala Lab Fisika
11	Sri Mulyani, S.Si	Kepala Lab Kimia
12	Rahmah, M.Pd	Wali Kelas X-1 MIPA
13	Dra. Nurlaili Hayati	Wali Kelas X-2 MIPA
14	Nizariah, S.Sos, M.Pd	Wali Kelas X-3 MIPA
15	Muhammad Ishak, S.Si	Wali Kelas X-4 MIPA



16	Arnita Aidil, S.Pd	Wali Kelas X-5 MIPA
17	Novira Padi, S.Pd	Wali Kelas XI-1 MIPA
18	Inong Eka Seprina, S.Si	Wali Kelas XI-2 MIPA
19	Laili Suryani, S.Si	Wali Kelas XI-3 MIPA
20	Raudhatul Jannah, S.Pd	Wali Kelas XI-4 MIPA
21	Zulfikar, S.E	Wali Kelas XI-5 MIPA
22	Jainal Ginting, S.Pd	Wali Kelas XII-1 MIPA
23	Drs. Samsul Rizal	Wali Kelas XII-2 MIPA
24	Ully Yunila, S.Pd	Wali Kelas XII-3 MIPA
25	Nellita Aryanti, S.Pd	Wali Kelas XII-4 MIPA
26	Afriadi, S.Pd	Wali Kelas XII-5 MIPA

## 5. Sarana dan Prasarana

No	RUANG	JUMLAH	KONDISI
1	Ruang Kepala Sekolah	1	Baik
2	Ruang Tata Usaha	1	Baik
3	Ruang Kesiswaan	1	Baik
4	Ruang Dewan Guru	1	Baik
5	Ruang Pengajaran	1	Baik
6	Ruang Perpustakaan	1	Baik
7	Gudang Perlengkapan	2	Baik
8	Lab Komputer	1	Baik
9	Lab Fisika	1	Baik
10	Lab Kimia	1	Baik
11	Lab Biologi	1	Baik
12	Lab Multimedia	1	Baik
13	Ruang Kelas	15	Baik
14	Ruang Studio Seni	1	Baik
15	Ruang Teater	1	Baik
16	Ruang Pertemuan (Aula)	1	Baik

17	Mushalla	1	Baik
18	Kantin	1	Baik
19	Asrama Putri Blok A dan B	2	Baik
20	Asrama Putra Blok C dan D	2	Baik
21	Ruang Makan Putra	1	Baik
22	Ruang makan Putri	1	Baik
23	Kamar Mandi Kepsek	1	Baik
24	Kamar Mandi Pegawai	3	Baik
25	Kamar Mandi Siswa	6	Baik

## 6. Keadaan Guru dan Pegawai

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian		Jenis Kelamin		Jumlah
		PNS	Honor	Laki-laki	Perempuan	
1	S2	4		1	3	4
2	S1	29		9	20	29
3	D3/Sarmud					
4	D2					
5	D1					
6	SMA	6		5	1	6
7	Total			15	24	39

## 7. Keadaan Siswa

No	Kelas	Rombel	Jumlah Peserta Didik		Jumlah
			L	P	
1	X MIPA	5	48	82	130
2	XI MIPA	5	53	89	142
3	XII MIPA	5	54	105	159
Jumlah Total		15	155	276	431

## Lampiran 5

### PROFIL MAN MODEL BOJONEGORO

#### SEJARAH

Sejarah Singkat MAN I Model Bojonegoro, awal kelahirannya berdasarkan SK Menteri Agama No. 17/1968, pada saat itu bernama SP IAIN (Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri) yang berstatus swasta bertempat di Masjid Agung Darussalam Bojonegoro. Lembaga tersebut didirikan bertujuan untuk menampung pemuda-pemuda dalam lembaga Islam, karena pada waktu itu dipandang perlu sekali, karena di daerah ini hanya terdapat sebuah lembaga pendidikan Islam tingkat atas yaitu PGAN. Kemudian mulai tahun ajaran 1979/1980 statusnya berubah menjadi negeri yaitu Madrasah Aliyah Negeri, bertempat di jalan Monginsidi 160 Bojonegoro. Berdasarkan SK Menteri Agama RI No. IV/PP.06/KEP/174/1998, tanggal 20 Februari 1998 ditetapkan sebagai Madrasah Aliyah Negeri Model.

#### KEADAAN LINGKUNGAN

Sesungguhnya keberadaan lingkungan strategis Madrasah, menjadi modal pengembangan madrasah, lingkungan tersebut meliputi lingkungan geografis, lingkungan demografis, lingkungan sosial ekonomi baik masyarakat sekitar Madrasah maupun orang tua siswa, budaya masyarakat, regulasi

pemerintah daerah yang memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi perkembangan dan peningkatan mutu Madrasah. Karena itu setelah menelaah analisis kondisi lingkungan pada masing-masing Madrasah perlu dijabarkan hal-hal dan implikasinya bagi perkembangan Madrasah.

#### 1) Kondisi Geografis

MAN I Model Bojonegoro terletak di jalan Monginsidi no.160 Bojonegoro. Dari arah Surabaya, sebelah barat stasiun KA kurang lebih 100 m, terdapat jalan menuju arah selatan. Di jalan tersebut terdapat beberapa sekolah, antara lain : SMAN 3 Bojonegoro, MTsN 1 Bojonegoro, MAN 2 Bojonegoro, dan MAN I Model Bojonegoro. Kondisi ini merupakan tantangan bagi MAN I Model Bojonegoro untuk bersaing secara kompetitif dengan sekolah/madrasah lain di sekitarnya. MAN I Model Bojonegoro terletak di sebelah selatan dari Pemkab Bojonegoro, tepatnya di jalan Monginsidi No. 160 Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro.

Dilihat letaknya Madrasah model ini cukup kondusif untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan, selain menawarkan ketenangan, kenyamanan juga keamanan.

Madrasah yang berdiri ± 28 silam ini berdekatan dengan koramil Bojonegoro dan paling selatan SDN 3 Pacul. Sebagai Madrasah model yang paling menawarkan misi unggul dalam prestasi, kompetitif dalam bersaing dan Islami dalam bertindak ini mempunyai potensi dan produk ke depan yang lebih baik.

## 2) Kondisi Lingkungan

Demografis MAN I Model Bojonegoro lahir di lingkungan pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Al-Falah di desa Pacul Kec. Bojonegoro. Artinya didalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dilakukan di dalam pondok pesantren tersebut, tentunya dengan segala keterbatasannya berkat dukungan atau partisipasinya dari masyarakat, serta institusi Departemen Agama, Madrasah ini dapat berdiri dan berkembang seiring berjalannya waktu di Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro. Memang jumlah penduduknya belum begitu besar namun karena mayoritas beragama Islam, tidak menyulitkan niat masyarakat sekitar untuk mendirikan sebuah madrasah yang baik dan berkualitas. Berkembangnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan teknologi informasi yang begitu cepat dapat membawa dampak yang kurang baik bagi masyarakat

ke depan. Dari fenomena di atas, masyarakat Bojonegoro memandang perlu untuk menghadirkan sebuah Madrasah yang mengedepankan nilai-nilai religi. Dengan kehadiran MAN I Model Bojonegoro diharapkan mampu menjawab sebagian masalah yang ada. Optimisme ini sangat berdasar mengingat animo masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya terhadap Madrasah ini semakin lama cukup besar.

### 3) Kondisi Sosial Ekonomi

Struktur ekonomi masyarakat di sekitar MAN I Model Bojonegoro sangat heterogen, antara lain : petani, PNS, TNI, Polri, BUMN, dan wirausaha. Sebagian besar orang tua siswa MAN I Bojonegoro berprofesi sebagai petani, PNS, serta wirausaha sedangkan untuk yang lain jumlahnya kecil, sehingga latar belakang sosial ekonomi orang tua bisa di katakan sebagai kalangan menengah.

### 4) Kondisi Religius Masyarakat

Hampir 95 % masyarakat di sekitar MAN I Model Bojonegoro beragama Islam yang terbagi dalam ormas keagamaan NU kurang lebih 70% dan Muhammadiyah sekitar 30%, karena latar belakang sosial yang hampir sama dalam struktur masyarakat membentuk komunitas

dan interaksi antara kedua ormas itu berjalan seimbang. Apabila ada gesekan antara keduanya lebih bersifat parsial bukan komunal. Kondisi ini menjadi modal sosial bagi pengembangan MAN I Model Bojonegoro ke depan karena 87 keberadaan Madrasah sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat sekitar.

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

Visi Madrasah Terwujudnya madrasah mandiri sebagai Rintisan Madrasah Bertaraf Internasional untuk menciptakan pusat keunggulan dan rujukan (keteladanan) di lingkungan Kementerian Agama dalam kualitas akademik dan non akademik serta akhlak karimah dengan visi; Unggul, Kompetitif, Islami.

Untuk memberikan gambaran konkret dan fungsional, maka visi madrasah dijabarkan ke dalam indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Menerapkan dan mengembangkan Manajemen Madrasah yang unggul dan ditopang oleh sumber daya manusia yang bermutu, sistem manajemen yang komprehensif dan handal dalam seluruh komponen.

- b) Menjalankan proses pembelajaran secara profesional dengan multi pendekatan, multi strategi dan multi media yang memadai, sehingga dapat mencetak lulusan yang berkualitas unggul dan kompetitif.
- c) Senantiasa mengikuti beragam kompetisi ataupun olimpiade secara sportif pada berbagai bidang, baik di tingkat lokal, regional ataupun nasional untuk memperkenalkan eksistensi Madrasah.
- d) Membangun budaya berprestasi baik bagi guru ataupun siswa dalam iklim yang kondusif, dengan menumbuhkan "Achievement Motivation" dan mendorong setiap personal untuk berusaha meraih kejuaraan akademik dan non akademik dalam berbagai level ataupun tingkatan.
- e) Mengintegrasikan tauhid dalam seluruh sistem dan manajemen madrasah, yang diaktualisasikan secara konsisten dan integral oleh semua komponen madrasah.
- f) Menciptakan suasana kehidupan Islami yang dibangun dan dikelola atas dasar komitmen yang utuh dan kokoh dalam ikhtiar membina kehidupan yang bersumber dari ajaran AlQur'ani dan Sunnah Nabi.
- g) Menjadi pelopor perubahan dan transformasi sosial serta menjadi model penerapan nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga tercipta masyarakat



akademik yang berbudaya, bermartabat dan berperadaban Islami.

## 2) Misi Madrasah

Secara operasional misi pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Negeri Model Bojonegoro dapat dirumuskan dalam kalimat, “Membina Insan Akademis Yang Religius, Jujur, Disiplin Dan Bersahabat Serta Memiliki Komitmen Mengamalkan Ajaran Islam Dalam Segala Aspek Kehidupan Untuk Mewujudkan Masa Depan Yang Bermutu Dan Diridloi Allah”.

Misi ini dijabarkan ke dalam point-point sebagai berikut:

- a) Membina anak didik agar memiliki dasar-dasar aqidah, syariah, keluhuran akhlak, kemampuan akademik, pengalaman dan keterampilan menuju kemandirian hidup.
- b) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan seni budaya bernafaskan Islam melalui kegiatan studi lapangan dan penelitian secara berkesinambungan.
- c) Memberikan kasih sayang, dan pelayanan kepada anak didik serta masyarakat dalam menggali ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan nilai-nilai Islam yang dapat menuntun perkembangan individual

dalam menjalani hidup yang mandiri, sejahtera dan diridhoi Allah.

- d) Membangun ketauladanan, nasehat, hikmah dan kearifan, menjunjung tinggi nilai Qur'ani dan tradisi Islam yang shohih.
- e) Mendidik generasi berpikir dan bersikap mandiri, kritis, kreatif, pemberani, bertanggung jawab dan berakhlak karimah.
- f) Mengembangkan motivasi, etos kerja dan meningkatkan kualitas kerja dan karya nyata untuk meraih prestasi gemilang yang diridhoi.
- g) Meningkatkan kualitas administrasi pendidikan yang efektif efisien.
- h) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar untuk mencapai prestasi prima.
- i) Meningkatkan kualitas partisipasi stakeholder untuk mengembangkan Madrasah Aliyah menuju keunggulan prestasi.

### 3) Tujuan Madrasah

Secara umum tujuan dari MAN I Model Bojonegoro adalah:

- i) Terwujudnya lulusan berkualitas akademik, non akademik dan berakhlak mulia,

- j) Terbangunnya budaya madrasah yang membelajarkan dalam satu visi,
- k) Terwujudnya sumber daya manusia madrasah yang memiliki kompetensi integral,
- l) Terlaksananya tata kelola madrasah yang berbasis sistem penjaminan mutu,
- m) Tercipta dan terpelihara lingkungan madrasah yang sehat, kondusif, dan harmonis,
- n) Terbentuknya Stakeholder yang memiliki madrasah (school ownership),
- o) Tercapainya standar nasional pendidikan secara otentik dan obyektif,
- p) Terwujudnya madrasah yang berorientasi pada standar international.

Motto Madrasah MAN I Model B0jonegoro mempunyai motto:  
"Terus Belajar, Cerdaskan Diri, Raih Prestasi, Gapai Ridlo Illahi"

Kualitas sumber daya manusia Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Bojonegoro sangat berpengalaman dan kompeten di bidangnya dengan tingkat kelayakan 100%. Sudah bersertifikat guru profesional sebanyak 55 orang dan sebagian masih

menyelesaikan proses studi magister (S2) dan bahkan ada yang mendapatkan tugas studi di Australia.

## **FASILITAS**

- 1) Lingkungan madrasah dan ruang belajar yang bersih dan nyaman (untuk pembelajaran Outdoor Study Area).
- 2) Ruang kelas ber-AC untuk program kelas Unggulan (RMBI) dan program kelas Akselerasi;
- 3) Media pembelajaran yang cukup memadai, LCD proyektor, OHP, slide, Audio Visual.
- 4) Ruang kelas ber-FAN untuk program kelas Reguler;
- 5) Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) beserta asrama, auditorium dan joglo, serta kebun biologi;
- 6) Laboratorium standar nasional terdiri dari: Laboratorium Kimia, Matematika, Laboratorium Fisika, Laboratorium Biologi, Laboratorium IPS (Geografi, Sosiologi, PKn, Ekonomi, Sejarah), Laboratorium Bahasa Inggris, Laboratorium Bahasa Indonesia/ 97 Bahasa Arab, Laboratorium komputer dengan jaringan LAN dan internet, ber- AC, serta audio visual
- 7) PUSKOM ( pusat komputer dan multi media );
- 8) Internet-website madrasah yang selalu update dan sesuai perkembangan.

- 9) Free Hotspot Area, untuk mendukung Self Learning (belajar mandiri).
- 10) Masjid yang menampung jama'ah guru dan siswa untuk sholat Dzuhur setiap hari.
- 11) Kopsis yang menyediakan kebutuhan siswa serta dilengkapi dengan foto copy.
- 12) Perpustakaan dengan referensi buku-buku yang memadai didukung dengan program database perpustakaan.
- 13) PESMAD (Pesantren Madrasah), sebagai wahana pendalaman kajian ilmu agama

## **EKSTRAKURIKULER**

- 1) Bimbingan siswa berprestasi akademik (KIR, olimpiade, kompetisi lokal/regional)
- 2) Olahraga Prestasi (Volly Ball, Atletik, Futsal dan Bela diri )
- 3) Kesenian (Musik, Tari, Lukis, Teater, Baca Al-Qur'an, Hadrah, Band dan Tradisional)
- 4) Keilmuan & kepemimpinan (Pramuka, PMR, Group Study Islam, Keta'miran Masjid, KIRAgama/
- 5) IPA/IPS/Bahasa, MC, Pidato Bahasa Asing dan Jurnalistik).
- 6) Life Skill (Elektronika, Tata Boga, Tata Busana, Home Industri)
- 7) Komputer Aplikasi Terapan (Administrasi Kantor, Desain Grafis, Teknisi, Database, dll)
- j. Prestasi 1) Juara 1 Olimpiade

Ujian Nasional tingkat Madrasah Aliyah seJatim 2) Juara 1 CCEI (Cerdas Cermat Ekonomi Islam) tingkat Jatim 3) Menjuarai beberapa lomba baik tingkat Wilker Pembantu Gubernur maupun Kabupaten (bidang : Olahraga, seni, KIR, Pidato, dll ) 4) Juara Lomba pencak silat tingkat kabupaten dan provinsi. 5) JuaraVoli putri se kabupaten Bojonegoro 6) Juara I Baca Puisi dan beberapa bidang seni lainnya. 7) Lulusan dari MAN I Model Bojonegoro banyak yang diterima di perguruan tinggi seperti UI, IPB, ITS, UNIBRAW, UNAIR, UNESA, IAIN, UNMUH, UM, UIN, AKBID, dan beberapa perguruan tinggi lainnya.

**SUMBER LAIN:**

<http://digilib.uinsby.ac.id/10354/8/bab%204.pdf>

<http://20504570.siap-sekolah.com/sekolah-profil/>



**BIODATA PENELITI**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Anton Widyanto, M.Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	197610092002121002
5.	NIDN	2009107601
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200910760107036
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bojonegoro / 09 Oktober 1976
8.	E-mail	anton.widyanto@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	08126914953
10.	Alamat Kantor	Prodi S2 PAI Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 23111
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Fiqh
13.	Program Studi	S2 PAI
14.	Fakultas	Pascasarjana UIN Ar-Raniry

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Walisongo	IAIN Ar-Raniry
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Semarang	Banda Aceh
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Sastra Arab	Pendidikan Islam	Fiqh Modern
4.	Tahun Lulus	2000	2002	2013

**C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2018	Integrasi Pendidikan Antinarkoba dalam Pendidikan Agama Islam melalui Lembaga Pendidikan Formal di Aceh	BLU Pascasarjana UIN Ar-Raniry
2.	2017	Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Penguatan Peran Lembaga Adat di Aceh	BKKBN Jakarta
3.	2017	Islam and Diversities: Study on the Role of Ulama in Strengthening	DIPA UIN Ar-Raniry/ Puslitpen

		Multicultural Education in Singapore (2017)	LP2M UIN Ar-Raniry
4.	2016	Keluarga Berencana Dalam Perspektif Sosio-Kultural Masyarakat Syari'at (Studi tentang Pandangan Masyarakat Aceh terhadap Alat Kontrasepsi)	BKKBN Jakarta
5	2016	LGBT di Nanggroe Syari'at: Implementasi Penegakan Qanun No. 6 Tahun 2014 terhadap Pelaku <i>Liwath</i> dan <i>Musahaqah</i> di Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry/ Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry
6	2015	Empowering school committee to improve School governance in Aceh (ICAIOS-University of Auckland, 2015)	ICAIOS-University of Auckland

#### D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2018	Supervisor KPM di Kabupaten Pidie	LP2M UIN Ar-Raniry
2.	2018	Narasumber Workshop Manajemen Jurnal di Kampus STIS Ummul Ayman	STIS Ummul Ayman
3.	2018	Narasumber Workshop Manajemen Tata Kelola Jurnal di lingkungan Kopertis wilayah XIII	Kopertis wilayah XIII
4.	2018	Narasumber Workshop Manajemen Tata Kelola Jurnal di Prodi PKK FKIP Unsyiah	Unsyiah
5.	2018	Narasumber Workshop Publikasi Ilmiah untuk kalangan Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry	Pascasarjana UIN Ar-Raniry
6.	2017	Supervisor KPM di Aceh Selatan (Kec. Meukek)	LP2M UIN Ar-Raniry
7.	2017	Narasumber Workshop Manajemen Tata Kelola Jurnal Ilmiah berbasis OJS	ICAIOS
8.	2017	Narasumber Workshop Manajemen Tata Kelola Jurnal Ilmiah berbasis OJS untuk Pengelola Jurnal di FTK UIN Ar-Raniry	FTK UIN Ar-Raniry
9.	2017	Narasumber Workshop Manajemen Tata Kelola Jurnal Ilmiah berbasis OJS untuk Pengelola Jurnal di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry	FSH UIN Ar-Raniry
10.	2016	Narasumber Workshop Manajemen Tata Kelola Jurnal Ilmiah berbasis OJS untuk Pengelola Jurnal di UIN Ar-Raniry	Perpustakaan UIN Ar-Raniry
11.	2016	Narasumber Workshop Publikasi Ilmiah untuk kalangan Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Gelombang I	Pascasarjana UIN Ar-Raniry



12.	2016	Narasumber Workshop Publikasi Ilmiah untuk kalangan Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Gelombang II	Pascasarjana UIN Ar-Raniry
13.	2016	Narasumber Workshop Publikasi Ilmiah untuk kalangan Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Gelombang III	Pascasarjana UIN Ar-Raniry
14.	2016	Narasumber Workshop Publikasi Ilmiah untuk kalangan Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Gelombang IV	Pascasarjana UIN Ar-Raniry
15.	2016	Narasumber Workshop Publikasi Ilmiah untuk kalangan Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Gelombang V	Pascasarjana UIN Ar-Raniry

#### E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

N o.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/ Tahun/ Url
1.	Philosophers without Borders: Toward a Comparative Philosophy of Education	Educational Studies: Journal of the American Educational Studies Association	47: 50–70, 2011 DOI: 10.1080/00131946.2011.540990 <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00131946.2011.540990">https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00131946.2011.540990</a>
2.	Reformulating Strategies to Develop Democratization through Civic Education in Aceh	Ulumuna	<a href="https://ulumuna.or.id/index.php/ujs/article/download/4/2">https://ulumuna.or.id/index.php/ujs/article/download/4/2</a>
3.	KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF SOSIO-KULTURAL MASYARAKAT SYARI'AT (Studi tentang Pandangan Masyarakat	Jurnal Keluarga Berencana	<a href="http://jurnalkb.org/ojskb2481/index.php/kb/article/viewFile/10/10">http://jurnalkb.org/ojskb2481/index.php/kb/article/viewFile/10/10</a>

	Aceh terhadap Pemakaian Alat Kontrasepsi		
4.	OPTIMALISASI FUNGSI MASJID SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENYELESAIKAN KRISIS SPIRITUAL REMAJA DI BANDA ACEH	Dayah: Journal of Islamic Education	<a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIE/article/view/2482">http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIE/article/view/2482</a>
5.	Pengembangan Fiqh di Masa Modern	Jurnal Ilmiah Islam Futura	<a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/46/41">http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/46/41</a>
6.	Peran Kepemimpinan Pimpinan Dayah dalam Membentuk Akhlak Santri di Dayah Raudhatul Qur'an Tungkob	Dayah : Journal of Islamic Education	<a href="https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIE/article/view/4176">https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIE/article/view/4176</a>
7.	Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Lhokseumawe	Dayah : Journal of Islamic Education	<a href="https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIE/article/view/2939">https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIE/article/view/2939</a>
8.	Etika Hubungan Pendidik dan Peserta Didik menurut Perspektif Pendidikan Islam dan Pendidikan	Dayah : Journal of Islamic Education	<a href="https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIE/article/view/2945">https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIE/article/view/2945</a>

	Barat (Studi Komparatif Pemikiran al-Zarnuji dan Paulo Freire)		
--	--	--	--

#### F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	DILEMA SYARI'AT DI NEGERI SYARIAT : KONTEKSTUALISASI HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DI ACEH	2015	250	Lembaga Naskah Aceh (NASA)
2.	SPIRITUALISME ACEH	2016	230	Bandar Publishing
3.	MENKAJI KEMBALI PERADABAN ISLAM : MENATA ULANG TRADISI UMAT ISLAM DALAM ASPEK ETIKA-ETIKA SOAIAL. INTELEKTUAL DAN SPIRITUAL (Editor)	2016	450	Bandar Publishing
4.	DAKWAH ISLAM DAN HUBUNGAN ANTAR PERADABAN	2016	200	Ar-Raniry Press
5.	MEMBANGUN PARADIGMA PENGEMBANGAN UIN AR-RANIRY (editor)	2015	350	Ar-Raniry Press
6.	PERBANDINGAN ASURANSI JIWA TAKAFUL BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Editor)	2015	200	Ar-Raniry Press
7.	Menyorot Naggroe	2013	330	Ar-Raniry Press

#### G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Pengembangan Fiqh di Era	2018	Karya Tulis	000121231

	Modern			
2.	Reformulating Strategies to Develop Civic Education	2018	Karya Tulis	000121209
3.	Dua Sisi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	2018	Karya Tulis	000124615
4.	Sang Penjilat	2018	Karya Tulis Lainnya	000124614
5.	Khutbah	2018	Karya Tulis Lainnya	000123884
6.	Dakwah 'Salah' yang tidak Salah	2018	Karya Tulis	000124630
7.	Malpraktik Dakwah	2019	Karya Tulis	000145784
8.	Andai Diana Bisa Bersaksi	2019	Karya Tulis	000145975
9.	Menyemai Qana'ah	2019	Karya Tulis	000145974
10.	Demokratisasi IAIN Ar-Raniry	2019	Karya Tulis	000145977
11.	Iktibar dari Sang Khalifah	2019	Karya Tulis	000145976

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019  
Ketua/Anggota Peneliti,

**Anton Widyanto**  
NIDN. 2009107601